

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERBATASAN DI PULAU SEBATIK
KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

NATALIA TANGKEALLO

NIM. 500893435

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “ Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik
Kabupaten Nunukan “

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Nunukan, Juni 2016

Yang Menyatakan



Natalia Tangkeallo
NIM. 500893435

ABSTRAK

Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

Natalia Tangkeallo
Nataliatangkeallo30@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pembangunan daerah perbatasan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan disparitas pembangunan dengan negara tetangga. Kenyataannya pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat dan menghilangkan disparitas pembangunan dengan negara tetangga seperti sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai serta ketergantungan masyarakat Pulau Sebatik kepada negara tetangga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Permasalahan tersebut akan dikaji lebih lanjut berkaitan bagaimana pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan serta menganalisis faktor – faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dan melakukan wawancara mendalam (*Indept Interview*) kepada informan untuk menggali informasi sesuai dengan bahan wawancara atau pertanyaan berkenaan hal – hal yang akan ditanyakan dan dapat bertambah sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan dalam bidang infrastruktur, bidang sosial ekonomi, dan bidang pendidikan sudah cukup banyak namun masih banyak yang tidak tepat sasaran dan belum dapat dinikmati masyarakat karena komitmen pemerintah yang rendah, kurangnya koordinasi dengan masyarakat sebagai sasaran pengguna pembangunan dan pembangunan yang dilaksanakan tidak berkelanjutan. Agar tujuan pembangunan yang dilaksanakan di daerah perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan dapat tercapai disarankan agar pemerintah pusat dan daerah melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pembangunan, pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan usulan masyarakat serta pemerintah pusat membuat peraturan perundang-undangan untuk melegalkan perdagangan lintas batas antar negara.

Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan, Daerah Perbatasan

The Study on the Border Area Development in Sebatik Island, Nunukan Regency

Natalia Tangkeallo
Nataliatangkeallo30@gmail.com

Graduate Program of Universitas Terbuka

ABSTRACT

Border area development program aimed at realizing the public welfare and eliminating disparities of the development with neighboring countries. In fact, the development of border area in Sebatik island, Nunukan regency has not fully prospered the public welfare and eliminated the disparity of development with neighboring country such as the educational facilities that are inadequate and the dependence of Sebatik Island people to neighboring country in fulfilling their basic needs. This problem is investigated further in relation to how the implementation of border area development and the factors that hinder the implementation of the development of the border area in Sebatik island, Nunukan regency.

This study aims to describe and analyze the border area development in Sebatik island, Nunukan regency and analyze the factors that hinder the implementation of the border area development there.

The method of the study is qualitative description by observing the object of the study and in-depth interviews to the informant to gather information in accordance with the interview materials or questions regarding the points that are asked and may be extended in accordance with the interactions that occur in the process of interviewing.

The results of this study indicate that the development of border area in Sebatik island, Nunukan regency in infrastructure, socio-economic, and educational fields is already quite a lot but there are still many things that are not targeted and can not be enjoyed by the public because of low commitment from the government, the lack of coordination with the public as the targeted users of development and the development is carried out unsustainable. To achieve the development that is carried out in the border area of Sebatik island, Nunukan regency, it is suggested that central and local governments coordinate in carrying out the development, the development is carried out in accordance with the needs and suggestions from the society, as well as the central government creates legislation to legalize trade.

Keyword: Public Welfare, Development, Border Area

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik
Kabupaten Nanukan

Penyusun TAPM :

Nama : Natalia Tangkeallo

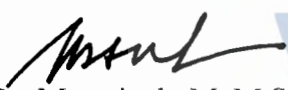
NIM : 500893435

Program Studi : Magister Administrasi Publik


Hari /Tanggal : Sabtu / 18 Juni 2016

Menyetujui :


Pembimbing II


Dr. Mustainah M, M.Si
NIP. 19630831 198803 2 002

Pembimbing I

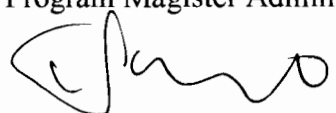

Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

Penguju Ahli

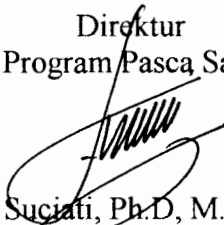

Prof. Dr. Aries Djenuri, MA
NIP. 19470401 196805 1 001

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Program Magister Administrasi Publik


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pasca Sarjana


Suciati, Ph.D, M.Sc
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Natalia Tangkeallo
NIM : 500893435
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul TAPM : Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik
Kabupaten Nanukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
Aministrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari /Tanggal : Sabtu / 18 Juni 2016

W a k t u : 08.00 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Tandatangan

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA

Pembimbing I

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Pembimbing II

Nama : Dr. Mustainah M, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Bapa di Surga, karena berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan Judul “ **Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan** “. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik dalam Ilmu Administrasi Publik Bidang minat Administrasi Publik program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun penyajian materi, namun penulis terbuka menerima kritikan atau saran yang bersifat membangun dalam menyempurnakan tesis ini.

Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak, maka dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Ibu Suciati, M.Sc.Ph.D
2. Kepala UPBJJ – UT Samarinda dan Tarakan selaku penyelenggaran program Pascasarjana
3. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada saya dalam penulisan TAPM ini.

4. Ibu Dr. Mustainah M, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada saya dalam penulisan TAPM ini.
5. Teman – teman satu kelompok bimbingan Bapak Sofyan atas kebersamaan, dukungan dan semangat dalam penulisan tesis ini.
6. Teman-teman di kantor dan satu kelas di Universitas Terbuka Indonesia UPBJJ-Samarinda Pokjar Nunukan
7. Ibuku tersayang Elisabet Boting Pasulu' dan semua kakakku serta ponakan - ponakan yang memberikan dorongan dan selalu medoakan saya.
8. Suamiku tercinta Fredy,S.Kom dan anakku sayang Mario Rafael yang tidak rewel kalau mama tinggal kuliah.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Tuhan memberkati

Akhir kata saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik terlebih khusus Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Nunukan, Juni 2016



Natalia Tangkeallo

Riwayat Hidup

Nama : Natalia Tangkeallo
NIM : 500893435
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat /Tanggal Lahir : Rantepao/ 24 Desember 1977

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Toraja pada tahun 1989
Lulus SMP di Rantepao pada tahun 1992
Lulus SMA di Rantepao pada tahun 1995
Lulus S1 di Universitas "45" Makasar pada Tahun 2002

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2003 s/d 2008 sebagai staf pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
Tahun 2008 s/d 2014 sebagai Kasubag Pelaporan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
Tahun 2014 s/d sekarang Kasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan

Nunukan, Juni 2016



Natalia Tangkeallo
NIM. 500893435

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Administrasi Publik.....	12
2. Pembangunan.....	16
3. Wilayah Perbatasan	22
4. Pendekatan Pembangunan	23
5. Penelitian Terdahulu.....	42
B. Kerangka Konsep Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Desain Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	49
D. Instrumen Penelitian	50
E. Prosedur Pengumpulan Data	51
F. Metode Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi dan Objek Penelitian	55
1. Letak Geografis dan Administratif.....	55
2. Topografi dan Iklim.....	57
3. Kependudukan	58
4. Perekonomian	60
5. Pendidikan dan Kesehatan.....	60

B. Hasil dan Pembahasan	64
1. Pembangunan daerah Perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan	64
2. Faktor – faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Pemikiran.....	47
Gambar 3.1. Analisis Data Model Miles dan Huberman	54
Gambar 4.1. Peta Adminsitrasi Kecamatan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan	56



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penyebaran SD dan MI di Pulau Sebatik	4
Tabel 1.2 Lokasi Pemberian Bantuan Mesin Pembuat Kripik Pisang di Pulau Sebatik	5
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat.....	56
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat.....	58
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk di Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat tahun 2014	59
Tabel 4.4 Fasilitas Pendidikan menurut jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat tahun 2014	61
Tabel 4.5 Jumlah Fakir Miskin di Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat tahun 2014.....	63
Tabel 4.6 Jumlah Fasilitas kesehatan di Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat tahun 2014.....	65
Tabel 4.7 Daftar Barang kebutuhan sehari – hari masyarakat Sebatik yang dilarang diperjual belikan di daerah perbatasan	80
Tabel 4.8 Kondisi Akses Jalan Ke sekolah di Kecamatan Sebatik Tengah	93
Tabel 4.9 Rasio peserta didik terhadap guru menurut jenjang pendidikan di Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negeri hidup berdampingan antara penduduk dengan pemerintahannya. Kesenambungan yang ditimbulkan berawal dari tingkat penghidupan yang layak dari pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakatnya. Bagaimana negara dapat menghidupi rakyatnya adalah dengan terus-menerus membangun seluruh infrastruktur maupun aspek - aspek yang lain yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pembangunan Nasional Negara Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara adil dan merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang tinggal di daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tersebut sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah yang belum dipecahkan, beberapa diantaranya kemiskinan, kesenjangan, masalah ketenagakerjaan, masalah lingkungan hidup dan sebagainya. Salah satu wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain adalah wilayah perbatasan.

Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk membangun masyarakat Indonesia agar memperoleh kehidupan yang lebih layak dengan cara menggerakkan perekonomian dalam arti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan *equity* (keadilan dan pemerataan pembangunan) serta secara

ekologis tetap memperhatikan aspek keberlanjutan bagi generasi berikutnya. Pembangunan pada daerah perbatasan merupakan kegiatan integral dari Pembangunan Nasional dan kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis Nasional karena dapat dijadikan pintu gerbang perdagangan serta merupakan gambaran wajah Negara Indonesia di mata dunia.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan merupakan salah satu usaha dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil dari pembangunan hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan hidup dari masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus memikirkan bagaimana harus mensejahterakan rakyatnya dengan mendengarkan dan melibatkan masyarakat sebagai partisipan dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian maka akan terlaksana pembangunan yang berkelanjutan dan memihak kepada rakyat.

Keberadaan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara lain, tidaklah salah bila dikatakan sebagai daerah pinggiran yang dimaksud dalam Nawacita yang ke-3. Pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan yang di mulai

dari Kalimantan Utara berarti pula mewujudkan Nawacita yang ke-3 tersebut yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan“. Kabupaten Nunukan terdiri dari 16 kecamatan 8 kelurahan dan 232 desa dengan jumlah penduduk 170.042 jiwa dengan kepadatan penduduk 11,47 jiwa/Km² (Nunukan dalam angka, 2014). Dari 16 kecamatan tersebut 5 kecamatan berada di Pulau Sebatik dimana kelima kecamatan ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, 3 kecamatan berbatasan darat yaitu Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat sedangkan 2 kecamatan lainnya berbatasan laut yaitu Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik.

Secara nyata banyak pejabat negara dan pemerintah daerah datang ke daerah perbatasan Sebatik namun masyarakat belum merasakan hasil pembangunan secara adil dan merata seperti bangunan sekolah dasar. Ada beberapa desa di Pulau Sebatik yang tidak memiliki bangunan sekolah dasar serta akses jalan menuju sekolah dasar yang belum memadai. Penyebaran sekolah dasar di Pulau Sebatik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Penyebaran SD dan MI di Pulau Sebatik

No	Lokasi	Jumlah SD (Sekolah Dasar)	Jumah MI (Madrasah Ibtidaiyah)
1	Kecamatan Sebatik		
	a. Desa Tg. Karang	2	1
	b. Desa Padaidi	-	1
	c. Desa Balansiku	-	1
2	d. Desa Sungai Manurung	-	-
	Kecamatan Sebatik Utara		
	a. Desa Seberang	-	-
	b. Desa Lapri	1	-
3	c. Desa Sei. Pancang	-	1
	Kecamatan Sebatik Tengah		
	a. Desa Aji Kuning	2	-
	b. Desa Bukit Harapan	2	-
4	c. Desa Sungai Limau	2	-
	d. Desa Maspul	-	-
	Kecamatan Sebatik Barat		
	a. Desa Setabu	2	-
5	b. Desa Liang Bunyu	1	2
	c. Desa Bambang	1	-
	d. Desa Binalawan	1	-
	Kecamatan Sebatik Timur		
5	a. Desa Sei. Nyamuk	1	1
	b. Desa Tg. Harapan	-	1
	c. Desa Tg. Aru	1	-
	d. Desa Bukit Aru Indah	1	2

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pembangunan di Pulau Sebatik yang berorientasi menyediakan fasilitas memenuhi kebutuhan dasar berupa fasilitas pendidikan bangunan sekolah dasar belum dapat dinikmati masyarakat Sebatik secara keseluruhan karena masih ada 3 (tiga) desa yang belum memiliki bangunan sekolah dasar yaitu Desa Sungai Manurung, Desa Seberang dan Desa Maspul sehingga anak-anak masih sulit untuk mendapatkan pendidikan dan harus ke desa tetangga untuk menempuh pendidikan dasar.

Pada Tabel 1.1 diatas juga nampak bahwa sekolah dasar di beberapa desa lainnya bukan sekolah negeri melainkan sekolah swasta yang pembangunan dan pengelolaan bukan dari pemerintah. Begitu juga dengan akses jalan menuju sekolah yang sebagian besar kondisinya masih jalan tanah.

Program kegiatan lain yang dilaksanakan di Pulau Sebatik yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu pemberian bantuan mesin pembuat kripik pisang pada tahun 2012 yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun tidak dapat digunakan oleh masyarakat karena hanya diberikan alatnya saja tanpa ada pendampingan dan pelatihan pengoperasian alat tersebut. Lokasi pemberian bantuan mesin pembuat kripik pisang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Lokasi Pemberian bantuan mesin pembuat kripik pisang di Pulau Sebatik

No	Lokasi	Jumlah
1	Kecamatan Sebatik - Desa Balansiku	1 Unit
2	Kecamatan Sebatik Timur - Desa Lapri - Desa Seberang	1 Unit 1 Unit
3	Kecamatan Sebatik Utara - Desa Tg. Aru - Desa Tg. Harapan	1 Unit 1 Unit
4	Kecamatan Sebatik Barat - Desa Binalawan - Desa Setabu	1 Unit 1 Unit
5	Kecamatan Sebatik Tengah - Desa Bukit Harapan - Desa Maspul	2 Unit 1 Unit

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa semua kecamatan di Pulau Sebatik sudah mendapatkan bantuan mesin pembuat kripik pisang namun program ini tidak berkelanjutan dan hanya sebatas pemberian alat saja masyarakat tidak bisa menggunakan alat tersebut sehingga program ini tidak memihak rakyat, berkelanjutan dan tidak tepat sasaran. Pemberian bantuan alat ini dapat meningkatkan penghasilan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun karena pemberian bantuan ini tidak dilanjutkan dengan program pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat maka alat ini tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Program selanjutnya yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat yaitu pemberian bantuan mesin penyaring air laut menjadi air minum pada tahun 2013 dari pemerintah pusat di Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Sebatik. Mesin penyaring air dioperasikan dengan tenaga listrik sementara jaringan listrik belum ada waktu itu, begitu juga dengan pengoperasiannya masyarakat tidak di berikan pelatihan dan pendampingan. Sampai sekarang mesin ini hanya tinggal begita saja tanpa dimanfaatkan walaupun di lokasi sudah ada jaringan listrik namun masyarakat tidak paham cara menggunakan mesin ini dan mungkin sudah rusak tanpa pernah digunakan. Program ini merupakan program untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam penyediaan fasilitas air bersih namun tidak dapat dinikmati oleh masyarakat karena pemerintah pusat hanya memberikan alat saja tanpa pendampingan artinya program sudah terealisasi tanpa mempertimbangkan asas manfaat dan keberlanjutan program. Padahal

sebenarnya keberadaan alat ini sangat dibutuhkan karena masyarakat di Pulau Sebatik hanya mengandalkan air hujan saja untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehingga jika musim kemarau maka masyarakat sangat kesulitan mendapatkan air bersih.

Program lain yang dilaksanakan di Pulau Sebatik yang tidak dinikmati masyarakat lainnya yaitu pembangunan tempat pelelangan ikan dengan dana APBN yang belum dioperasikan sebagaimana peruntukan dalam perencanaan pembangunannya. Program ini merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam penjual hasil tangkapan ikan di laut yang bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok namun pembangunan pelelangan ikan ini hanya dibangun dan sekarang sebagian bangunannya sudah rusak bahkan jembatan dermaga sudah ambruk. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan TPI hanya memboroskan uang negara, pemerintah hanya ingin mencapai realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan namun tidak memperhatikan kelayakan pembangunan TPI dan pengelolaan serta penggunaan bangunan ini.

Perekonomian masyarakat Sebatik sangat tergantung ke Tawau Malaysia, Dewanti lestari dalam *antaranews.com* menjelaskan bahwa omzet yang diperoleh Malaysia dari jual beli warga Sebatik mencapai Rp 500 Juta per hari, hal ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka karena jarak Sebatik - Tawau lebih dekat dibanding jarak Nunukan dan Tarakan. Demikian juga ketika menjual potensi hasil bumi di Sebatik semua dibawa ke Tawau.

Pembangunan di daerah perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yang belum memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dikaji oleh Sonny Sudiar yang menulis jurnal dengan judul Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia. Dalam penelitian ini Sonny menyimpulkan bahwa kebijakan yang menjadi acuan dalam pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan bersifat elitis dan *top down policy*. Akibatnya banyak program pembangunan kawasan perbatasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat di Pulau Sebatik. Pada kenyataannya memang terjadi pembangunan sejumlah infrastruktur perbatasan, seperti: fasilitas jalan, pelabuhan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Akan tetapi hasil pembangunan kurang terlalu maksimal dan secara keseluruhan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan seperti yang ada di pulau Sebatik. Untuk kebutuhan pokok beberapa masih mereka beli dari negara tetangga Malaysia, untuk pengobatan yang membutuhkan tindakan operasi atau penyakit serius masyarakat di pulau Sebatik lebih memilih untuk berobat ke Tawao, Sabah (Malaysia). Kenyataan ini membuktikan betapa pembangunan di kawasan perbatasan pulau Sebatik masih jauh dari harapan seperti yang termuat dalam tujuan kebijakan yang sudah diformulasikan. Dalam banyak hal masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Kondisi daerah perbatasan seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kondisi daerah perbatasan tidak menguntungkan, program pembangunan yang dilaksanakan belum memihak rakyat dan berkelanjutan kehidupan masyarakat setempat serta wilayahnya masih terbatas dan tertinggal dibandingkan dengan daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Akses jalan sulit dilalui, pasokan listrik minim, jaringan telekomunikasi yang kurang memadai, irigasi seadanya, lahan pertanian yang terbatas, fasilitas kesehatan terbatas, sekolah dan pasar yang jaraknya jauh. Kondisi inilah yang mengakibatkan ada masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Malaysia.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Sebatik perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melaksanakan pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang berorientasi kepada penyediaan secara langsung kebutuhan dasar seperti penyediaan jasa kebutuhan dasar berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih yang lebih memihak rakyat, berkelanjutan dan tepat sasaran dengan memperhatikan partisipasi dan usulan masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan prioritas kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat.

Berdasarkan pokok masalah dalam latarbelakang tersebut di atas, maka menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji penelitian dengan judul "**Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan ?
2. Faktor-Faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembangunan Ilmu Administrasi Publik khususnya pembangunan daerah perbatasan .

- b. Sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya berkenaan dengan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan.
2. Manfaat secara praktis
- a. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan pembangunan daerah perbatasan.
 - b. Bagi penulis sendiri sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang pembangunan daerah perbatasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi sebagai pelayanan kepada masyarakat mempunyai tugas mengimplementasikan setiap kebijakan publik untuk mensejahterakan masyarakat. Melihat fenomena dan keragaman wilayah Indonesia dengan berbagai potensi yang dimiliki belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki tersebut seharusnya digali untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam pelaksanaan program pembangunan pada daerah tertinggal yang berada pada wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengertian administrasi menurut Siagian (2008) adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Peranan Administrasi Publik sangat penting dalam mengawal pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah melalui pelaksanaan kebijakan dan program-program kegiatan pemerintah. Pengertian Administrasi Publik dalam Wikipedia adalah Ilmu Sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang

meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan bernegara dan etika mengatur penyelenggara negara.

Waldo (1971:15) mengemukakan administrasi publik dilihat dalam 2 (dua) aspek yaitu: 1) Administrasi publik adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah, 2) Administrasi publik adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Antara organisasi dan manajemen dalam administrasi publik memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, organisasi menunjukkan struktur atau perangkat sedangkan manajemen diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya melalui orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Kombinasi keduanya melalui penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perubahan orientasi dan peran administrasi publik diperlukan untuk merespon dinamika masyarakat yang tinggi terutama untuk menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan efektif serta menciptakan keadilan sosial bagi warga masyarakat.

Pengertian lain berkenaan administrasi publik oleh Henry (1995:25) menyatakan bahwa :

Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebijakan publik

Apa yang penting dalam menjalankan administrasi publik adalah bagaimana orang-orang mengorganisasikan dirinya sebagai masyarakat secara bersama-sama dan dengan tugas dan kewajiban masing - masing sesuai bidang tugasnya memecahkan masalah-masalah publik untuk mencapai tujuan bersama.

Walaupun proses administrasi publik menempatkan pemerintah sebagai lembaga utama atas tugas - tugas pemerintah, proses tersebut juga melibatkan masyarakat sebagai sumber legitimasi dan tujuan dari mana dan kepada siapa proses administrasi diselenggarakan. Dalam negara yang demokratis proses administrasi publik dilakukan atas mandat yang diberikan oleh publik melalui proses yang melibatkan publik dan untuk sebesar - besarnya manfaat yang dapat diterima oleh publik (Harmon dan Mayer, 1986 : 30).

Administrasi Pembangunan adalah bagian dari Administrasi publik dengan ciri utama yaitu suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan (Bintoro, 1988 : 9). Lebih lanjut Bintoro menjelaskan ciri - ciri Administrasi Pembangunan yaitu :

- a. Berorientasi kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan - perubahan besar di berbagai bidang /kegiatan

- b. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain

Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. (Siagian: 2008 : 45).

Upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, yang berarti menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya, serta peranan pemerintah yang cukup dominan. Dunia usaha memainkan peranan yang besar terutama di bidang ekonomi. Para teoritis dan cendekiawan ditantang untuk memberikan sumbangsuhnya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini turut berperan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pengawasan sosial, bahkan rakyat jelata juga dilibatkan. Pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai penonton, semua harus berperan sebagai pemain.

Siagian merumuskan administrasi pembangunan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari pada rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka “*Nation Building*” (Siagian 1972 : 38).

2. Pembangunan

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya - upaya secara sadar dan terencana ke arah yang lebih baik . Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Bratakusumah, 2005 : 41). Portes (1976 : 50) mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan sumberdaya, informasi dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memperhatikan perkembangan global. (Bappenas, 1999).

Pembangunan nasional adalah perubahan yang berlangsung secara meluas dalam masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi saja, seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada

grafik tenaga kerja. Pembangunan mencakup masalah perubahan - perubahan ekonomi, sosial, politik yang pelik dimana masalah tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Di Indonesia pembangunan nasional mempunyai hakekat yaitu pembangunan manusia seutuhnya dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai perbaikan taraf hidup berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita - cita dan kemerdekaan Bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV.

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilaksanakan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat. Menurut Siagian (2001:4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Ginanjari Kartasasmita dalam (Riyadi 2005:4) menyatakan pengertian yang lebih sederhana mengenai pembangunan. Beliau mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Katz dalam (Yuwono 2001:47) pembangunan sebagai

perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam (Yuwono 2001:54) bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan di mana pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber - sumber pengawasan dan pengarahan proses - proses pelaksanaan pembangunan. Pembangunan Nasional adalah suatu proses yang merupakan rangkaian perubahan majemuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. (Bintoro dan Mustopadidjaja, 1986 : 21).

Menurut (Amidjojo 1985:89) bahwa dalam proses pembangunan ada 5 dimensi penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku pembangunan, yaitu :

- a. Dimensi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat menurut pandangan ekonomi bahwa suatu negara dikatakan maju jika negara tersebut pertumbuhannya meningkat. Karena indikator pertumbuhan ekonomi tetap penting dalam hal ini bila ekonomi meningkat maka kesejahteraan sosial pun meningkat.
- b. Dimensi transformasi sosial masyarakat ke arah masyarakat maju (modern). Dalam transformasi sosial ke arah modernisasi ini tidak hanya terdapat ukuran perkembangan ilmu teknologi, akan tetapi juga perubahan nilai - nilai sosial dalam masyarakat.
- c. Dimensi pembangunan bangsa, dalam konsep ini dilihat perkembangan suatu masyarakat primordial ke arah masyarakat nasional, dengan proses integrasi nasional dikembangkan kepribadian, ideologi dan wawasan kebangsaan, termasuk integrasi stabilitas dan partisipasi politik dari ikatan solidaritas sederhana dan daerah ke arah menguatnya ikatan dan

- kepentingan nasional sebagai bangsa yang majemuk. Hal ini berlaku secara global, namun di lain pihak ikatan kekeluargaan kedaerahan dengan suatu sebutan “Bhineka Tunggal Ika” merupakan konsep pembangunan yang perlu dipertahankan.
- d. Dimensi keseimbangan, dalam konsep ini pembangunan yang berwawasan lingkungan dimensi ini sangat diperlukan, artinya keseimbangan dan keserasian antara kehidupan manusia dan lingkungan.
 - e. Dimensi manusia sebagai pusat perhatian dalam proses pembangunan. Dalam perspektif positif proses pembangunan berarti pembangunan manusia yang lebih mampu membangun kualitas hidup yang lebih baik. Aspek perkembangan sumber daya manusia tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan akan tetapi juga diarahkan pada perilaku dan sikap yang kondusif untuk perubahan ke arah kesejahteraan dan kemajuan.

Pembangunan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh *United Nation Center for Regional Development (UNCRD)* salah satu Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dikutip oleh Yuwono (2001:54) mengemukakan 3 hal dalam pembangunan masyarakat yaitu :

- a. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat yang demikian ini merupakan kelengkapan dan strategi kebutuhan pokok. Pembangunan dalam hal ini identik dengan peningkatan pelayanan sosial dan pemberian fasilitas sosial seperti kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi dan sebagainya yang keseluruhannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi, di banyak negara pembangunan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih baik seperti pemerataan keadilan, peningkatan budaya dan sebagainya.
- c. Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia berbuat anggapan dasar dari interpretasi pembangunan yang demikian adalah bahwa manusia dan bukan ekonomi dan teknologi yang menjadi fokus dan sumber pembangunan yang utama. Kehendak, komitmen dan kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat merupakan

sumber pembangunan yang strategis. Pembangunan masyarakat menyangkut suatu upaya yang terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi anggota dan mobilisasikan antusiasme mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka.

Pembangunan tidak sekedar suatu proses unlinear dan menyangkut satu aspek atau suatu bidang saja melainkan bersifat multi dimensional, begitu pula tolak ukur dan kriteria - kriteria keberhasilannya tidak cukup hanya dengan ukuran yang bersifat ekonomis. Hal ini harus dipahami oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dimana perannya dalam pembangunan daerah dalam rangka realisasi pelaksanaan otonomi daerah, kurangnya sumber daya manusia dalam menyusun rencana dalam pelaksanaan pembangunan akan menimbulkan implikasi - implikasi yang bersifat negatif bagi suksesnya pembangunan itu sendiri demikian pula egosentrisme yang berlebihan dari daerah akan membawa konsekwensi yang serius bagi pembangunan di kemudian hari.

(Yuwono 2002:18) berpendapat bahwa suatu tujuan dan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik kalau disusun dan didesain dalam kerangka siklus kebijakan publik yang benar, komprehensif dan mendalam artinya bahwa tujuan pembangunan yang sebenarnya harus memperhatikan kebijakan publik, dimana para pemegang kebijakan sektor publik (masyarakat) merupakan hal yang terpenting dalam perencanaan pembangunan serta masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Kesenjangan sosial yang kurang memperhatikan aspek kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di daerah, keberhasilan pembangunan tidak

semata - mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen bangsa juga mempengaruhi keberhasilan pembangunan, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah baik dari segi sumber daya maupun aspek pembiayaan pembangunan.

Dari beberapa pengertian pembangunan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan mengandung unsur - unsur : usaha/proses, peningkatan kemajuan atau perubahan ke arah yang lebih baik, berkesinambungan, dilakukan secara sadar atau sengaja, terencana, untuk tujuan pembangunan bangsa dan dilakukan secara bertahap.

Pembangunan bertujuan untuk kebaikan masyarakat yang memiliki hakikat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Siagian dalam (Khiruddin 2000:29) menyatakan bahwa pada umumnya, komponen cita - cita akhir dari negara modern baik yang sudah maju ataupun yang sedang berkembang, adalah hal - hal yang pada hakikatnya adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya titik jenuh yang absolut yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti : (1) keadilan sosial, (2) kemakmuran yang merata, (3) perlakuan sama di mata hukum, (4) kebahagiaan mental, spritual dan material (5) kebahagiaan untuk semua, (6) ketentraman dan (7) keamanan.

Melihat tujuan - tujuan tersebut di atas, maka nyatalah tidak ada sesungguhnya titik akhir dalam pembangunan. Karena sasaran atau tujuan di atas sangat bersifat abstrak, dan dibuat demikian agar tetap dapat

dipergunakan sepanjang masa, selama masyarakat dan negara yang bersangkutan masih ada.

Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap - sikap masyarakat dan institusi - institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Jadi hakekat pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual.

3. Wilayah Perbatasan

Perbatasan negara adalah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan negara lain dan batas - batas wilayahnya ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Nurdjaman dan Rahadjo, 2005 : 20).

Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut yang tersebar secara luas dengan tipologi yang sangat beragam mulai dari pedalaman hingga pulau - pulau kecil terdepan/terluar (Bappenas, 1999).

Pengelolaan perbatasan negara adalah kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga. Setiap kawasan perbatasan memiliki ciri khas masing - masing dan potensi yang berbeda antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Potensi yang dimiliki kawasan perbatasan yang bernilai ekonomi cukup besar adalah sumber daya alam (hutan, tambang dan mineral serta perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang dan di sekitar kawasan perbatasan. Meskipun demikian wilayah perbatasan selalu menjadi wilayah yang hampir luput dari perhatian pemerintah dalam proses pembangunan sehingga masyarakat perbatasan menjadi masyarakat yang termarginalkan.

4. Pendekatan Pembangunan

Pendekatan teoritik untuk menjelaskan konsep pembangunan Muhi sebagaimana dikutip oleh Soleh (2012 : 2-3) mengemukakan beberapa pendekatan teoritik sebagai berikut :

- a. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin mengemukakan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan

yang sangat sederhana kearah kehidupan yang semakin kompleks sebagai akibat dari perubahan sosial, ekonomi, kependudukan, geografis, rasial, teknologi maupun idiologi.

- b. Teori perubahan sosial oleh Emile Dukrheim, menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat perubahan struktur sosial dalam bentuk pembagian pekerjaan. Dalam konteks pendekatan teori yang sama, Redfield menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat modern/perkotaan.
- c. Teori struktural fungsional oleh Parsons, menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status sebagai akibat dari hubungan atau interaksi sosial yang berakibat pada upaya untuk melakukan adaptasi terhadap situasi tertentu, upaya untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu, upaya untuk melakukan integrasi dengan melakukan pengaturan hubungan integrasi dan upaya untuk menetapkan suatu pola atau aturan yang disepakati bersama untuk menjaga hubungan baik atau setidak – tidaknya untuk mengurangi ketegangan dari suatu pola atau budaya tertentu.
- d. Teori Ekonomi oleh Gunandar Mirdal. Menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup variabel – variabel seperti pendapatan, produktivitas, tingkat kehidupan, sikap dan pranata sosial dan rasionalitas. Terkait dengan pendekatan teori ekonomi ini Rostow menyatakan adanya tahapan

pertumbuhan ekonomi yang berawal dari masyarakat tradisional, tahap persiapan tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap kedewasaan/kematangan dan tahap konsumsi massal yang tinggi.

- e. Teori Konflik oleh Karl Marx, menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya konflik atau pertentangan ekonomi antara kelas pemodal yang berkuasa dengan kelas buruh yang tertindas.
- f. Teori Ekologi oleh Odum, menyatakan bahwa adanya hubungan antara manusia dengan lingkungan fisik sosial. Menurutnya pembangunan terjadi sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah maupun optimasi pemanfaatan sumber daya yang semakin terbatas.
- g. Teori ketergantungan oleh Frank, menyatakan bahwa adanya dominasi negara maju atas negara terbelakang atau belum berkembang, sedemikian rupa sehingga pembangunan di negara yang belum maju akan terus bergantung pada kehendak/kebutuhan negara maju.

Bintoro dan Mustopadidjaja menyatakan bahwa pembangunan bagi negara-negara yang baru mencapai kemerdekaannya setelah PD II terarah pada usaha untuk melepaskan diri dari ikatan - ikatan tradisional dan hambatan - hambatan transisional menuju tingkat stabilitas dan kemajuan tertentu. (Bintoro dan Mustopadidjaja ,1986 : 23) mengemukakan beberapa teori dan pendekatan dalam pembangunan seperti berikut :

- a. Pendekatan Pembangunan Bangsa (*Sociocultural Development Approach*)

Pendekatan pembangunan bangsa tidak hanya menekankan pembangunan fisik saja, melainkan juga mental dan kultur masyarakatnya. Pendekatan ini memberikan wacana baru terhadap studi pembangunan di samping pendekatan-pendekatan pembangunan ekonomi. Dalam pendekatan pembangunan bangsa ada dua aspek permasalahan menurut Bintoro dan Mustopadidjjaa yaitu pembangunan politik (*political development*) dan pembangunan sosial budaya (*socio cultural development*)

1) Pembangunan Politik (Political Development)

Pembangunan politik dapat dikatakan sebagai suatu proses pembinaan bangsa (*nation building*). Pengertian pembinaan bangsa menurut (Esman , 1971 : 15) adalah usaha sistematis dan terpadu dalam pembangunan masyarakat politik, Sementara (Pye, 1996 : 27) menganggap bahwa pembangunan politik adalah pembinaan bangsa. Dan Esman menganggap bahwa pembinaan bangsa merupakan bagian dari pembangunan politik.

Ada dua hal yang dapat ditarik dari pembangunan tersebut yaitu pertama apapun perbedaannya pembangunan politik dan pembinaan bangsa tidak dapat dipisahkan berarti keduanya dijalankan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Kedua bahwa pembangunan politik dan pembinaan bangsa merupakan dua hal penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam konteks pembangunan secara umum.

Dalam Pendekatan pembangunan politik ini ada tiga aspek yang perlu diperhatikan terutama dalam kaitannya dengan masalah pembinaan kelembagaan yang dikemukakan oleh Esman dalam (Bintoro dan Mustopadidjaja , 1986 : 25) yaitu : 1) Elit penguasa yang mendorong dan mengarahkan perubahan modernisasi, 2) Doktrin yang mendasari norma - norma, prioritas, peralatan dan strategi elit penguasa tersebut dan 3) peralatan yang menjamin komunikasi dua arah dan yang mampu menerjemahkan komitmen-komitmen politik kedalam suatu program operasional.

2) Pembangunan Sosial Budaya (*Socio Cultural Development*)

Bidang pendidikan merupakan suatu titik strategis bagi penyelenggaraan pembangunan sosial budaya, juga alat bagi mempertahankan keutuhan, kelangsungan dan kemajuan kebudayaan serta peradaban. (Bintoro dan Mustopadidjaja , 1986 : 26). Melalui pendidikan suatu sistem sosial dapat berubah untuk maju karena pendidikan merupakan dasar masyarakat supaya berpikir inovatif dan solutif.

b. Pendekatan Pembangunan Ekonomi

Pendekatan pembangunan ekonomi dapat dibagi dalam tiga aliran dalam (Bintoro dan Mustopadidjaja ,1986 : 30) yaitu :

1) Aliran Klasik

Tokoh sentral dalam aliran klasik adalah Adam Smith yang memiliki dasar ajaran individualisme. Sistem individualisme

ekonomi menyerahkan aturan dan penguasaan ekonomi kepada masyarakat sedangkan pemerintah tidak perlu campur tangan. Menurut Adam Smith bahwa tanpa campur tangan pemerintah akan terbentuk keseimbangan dalam sistem perekonomian masyarakat. Harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar menurutnya akan mempengaruhi produksi, alokasi, pendapatan dan distribusi serta konsumsi. Dengan demikian harga yang terbentuk di pasar akan mengatur rencana produksi, pengalokasian serta pendistribusiannya secara ilmiah. Ajaran Adam Smith dalam praktiknya banyak menimbulkan kepincangan sosial, yang memunculkan jurang pemisah yang sangat dalam diantara pelaku ekonomi yang sangat timpang dimana yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin karena siapa yang kuat dialah yang menang.

Sejalan dengan Smith adalah pandangan Mill dalam (Bintoro dan Mustopadidjaja, 1986 : 31) yang menyatakan bahwa dengan spesialisasi dan pembagian kerja, keterampilan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat dengan demikian ekonomi akan tumbuh. Sedangkan Rikardo dan dalam (Bintoro dan Mustopadidjaja ,1986 : 33) menyatakan bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mengalami *stationary state*, karena perkembangan penduduk akan melebihi kecepatan pembangunan ekonomi.

2) Aliran Keynesian

Berbeda dengan aliran Keynesian ajaran Smith berpendapat lain bahwa karena menurutnya campur tangan pemerintah secara tidak langsung dalam sistem perekonomian masyarakat sangat diperlukan. Menurut Keynes dalam teori umumnya bahwa malapetaka yang terjadi di dunia barat disebabkan oleh kurangnya penanaman modal dari para pengusaha, maka untuk mengatasinya pemerintah harus turun tangan. Dalam hal ini Pandangan Keynes lebih memfokuskan perhatiannya pada analisis ekonomi jangka pendek dimana pada saat itu dunia sedang mengalami depresi dan pengangguran, maka untuk mengatasinya pemerintah harus turun tangan.

Pendukung aliran adalah Harrod dan Domar yang pada intinya menekankan pada pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Menurut mereka pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh dua unsur pokok yaitu tingkat tabungan atau investasi dan produktivitas kapital. Menurut teori ini, masyarakat dalam suatu sistem perekonomian dituntut untuk memiliki tabungan sebagai sumber investasi. Hipotesa yang dianutnya adalah bahwa semakin besar tabungan dan investasi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, sebaliknya semakin rendah produktivitas kapital semakin rendah pula pertumbuhan ekonomi. (Bintoro dan Mustopadidjaja : 1986 : 34).

3) Aliran Neo Klasik

Menurut kaum neo-klasik laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan dalam penawaran faktor - faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Dalam teori neo-klasik teknologi dianggap sebagai faktor eksogen yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh negara di dunia.

Dalam perkembangan teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya, menyatakan bahwa peran perdagangan sebagai faktor penting di luar modal dan tenaga kerja. Selain faktor-faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja dan teknologi yang digunakan perdagangan dipandang sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu negara.

c. Teori Dasar Pembangunan Sekarang

1) Teori Pendekatan Ekologi / Berkelanjutan (selaras alam)

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Budimanta (2005:) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada

generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Menurut Salim (2003 :) pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan, ekuitas sosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan). Untuk itu secara sadar diusahakan investasi dalam modal ekonomi (finansial, modal mesin dll), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi sumber daya alam diperbaharui dan daur ulang serta substitusi sumber daya alam yang terbaharui).

Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan dalam Nasution tanggal 3 Pebruari 2013 dalam Bangazul.com yaitu :

- a) Pemerataan dan keadilan sosial, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan generasi sekarang dan yang akan datang berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkesinambungan berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat.
- b) Menghargai keanekaragaman (*diversity*), perlu dijaga keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Keaneka ragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang
- c) Menggunakan pendekatan integratif yaitu mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak karena itu pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman

- akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan
- d) Perspektif jangka panjang, kecenderungan menilai masa kini lebih utama dari masa akan datang harus diubah.

Sedangkan menurut (Marlina : 2009 : 19) ada 3 pilar dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan sosial. Aspek sosial maksudnya pembangunan yang berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interrelasi dan interdependensi yang erat kaitannya dengan aspek budaya. Tidak hanya pada permasalahan ekonomi pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat supaya masyarakat tetap eksis untuk menjalani kehidupan sampai masa mendatang. Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan adalah a) terpeliharanya proses ekologi yang esensial, b) tersedianya sumber daya yang cukup dan c) lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sesuai.

2) Teori Sumber Daya Manusia

Pendekatan ini merupakan model pembangunan yang mencoba meletakkan diri manusia sebagai unsur mutlak dalam proses pembangunan dan lebih sesuai diterapkan pada negara-negara yang sedang berkembang karena :

- a) Negara sedang berkembang relatif lemah dalam permodalan

- b) Komposisi penduduk yang kebanyakan adalah unsur Unskilled ditinjau dari sudut keterampilannya
- c) Negara sedang berkembang biasanya masih menghadapi masalah ketenagakerjaan yang cukup serius akibat dari pertumbuhan angkatan kerja dan kenaikan jumlah penduduk yang cukup tinggi

Pendekatan ini berorientasi pada selektivitas teknologi yang sesuai, disamping meningkatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi yang lebih tinggi dan menekankan pada penggunaan tenaga kerja manusia yang berlebih sebagai kekuatan pembangunan dan menghindari terusir tenaga kerja sebagai akibat penggunaan teknologi yang belum mampu sesungguhnya digunakan secara efisien. Selain itu Pendekatan ini juga menolak masuknya teknologi, tetapi menunda hal tersebut sampai manusia yang akan menggunakan teknologi dengan tepat dan efisien serta tidak mengorbankan tenaga kerja yang ada lebih besar.

Inti dari teori ini adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial bagi pembangunan dengan melahirkan wiraswasta yang kreatif dan dinamis.

3) Teori Mulai dari yang Paling butuh

Pendukung pendekatan ini adalah Scumacher dalam (Bintoro dan Mustopadidjaja , 1986 : 45) menyatakan bahwa

sukses sektor modern hanya akan merupakan suatu hal yang maya apabila sebagian masyarakatnya hidup dalam kemiskinan dan keputusasaan yang menindas maka untuk mengatasi kemelaratan adalah mendahulukan yang paling membutuhkan pertolongan.

Scumacher mengemukakan bahwa pembangunan tidak mulai dari barang tetapi mulai dari manusia dengan pendidikan, organisasi dan disiplin yang tinggi. Teori pembangunan ini mendahulukan yang paling membutuhkan pertolongan bisa tempat/lokasi atau masyarakat.

4) Teori Pemerataan dan Pertumbuhan

Pendekatan ini lebih menekankan pada pertumbuhan pendapatan masyarakat yang masih berada pada lapisan terbawa. Lapisan terbawa ini sekitar 40% dari seluruh masyarakat. Strategi ini digunakan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan.

Ada 2 strategi yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan teori pertumbuhan dan pemerataan (Mornis yang dikutip oleh Bintoro dan Mustopa dalam (Khoruddin 2003:38) :

- a) Pembangunan terarah pada peningkatan kesejahteraan 40% penduduk golongan termiskin
- b) Cara-caranya harus bersifat "*Fundamental Institutional Reform*"

5) Teori Mencukupi Kebutuhan Dasar

Pendekatan pembangunan memenuhi kebutuhan dasar digagas dan didukung oleh *International Labor Organization* (ILO) pada tahun 1976. (Bintoro dan Mustopadidjaja , 1986 : 50). Menurut ILO pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok berorientasi pada penyediaan secara langsung kebutuhan dasar meliputi :

a) Kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan permukiman

Pembangunan diarahkan terhadap penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yaitu makanan, pakaian dan perumahan yang merupakan serangan terhadap kemelaratan masyarakat miskin.

b) Jasa-jasa kebutuhan dasar masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan untuk menyediakan sarana dasar kehidupan masyarakat luas yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih dan transformasi secara publik;

c) Lapangan kerja yang produktif

Strategi, rencana dan kebijakan pembangunan diarahkan untuk menyediakan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat luas yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai tujuan pembangunan yang diprioritaskan.

d) Partisipasi aktif masyarakat

Pembangunan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia saja tapi pembangunan kebebasan untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak untuk memberi atau menerima gagasan dorongan-dorongan yang menyangkut kepentingan sendiri.

Pendekatan ini lebih menekankan pada pembangunan negara yang sedang berkembang, yang masalah kebutuhan pokoknya masih merupakan masalah yang cukup pelik terutama kebutuhan sandang, pangan dan perumahan serta pendidikan yang memadai. Terlepas dari usaha pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan ini juga tidak terlepas dari strategi pembangunan secara menyeluruh termasuk pendidikan politik atau pertumbuhan negara bangsa.

Sasaran dari pendekatan mencukupi kebutuhan dasar adalah kemelaratan dan kepincangan pembagian pendapatan yang diderita golongan miskin dengan mencukupi persyaratan rumah tangga dan mencukupi sarana dasar kehidupan masyarakat luas seperti air minum, sanitasi, angkutan umum dan kesehatan serta fasilitas-fasilitas pendidikan dan kebudayaan.

6) Teori Mengurangi Ketergantungan

Teori Ketergantungan atau dikenal teori dependensi (*Dependency Theory*) adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut Negara Dunia Ketiga. Menurut Theotonio Dos Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara - negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara - negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Aspek penting dalam kajian sosiologi adalah adanya pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia. Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili "suara negara-negara pinggiran" untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya dan intelektual dari negara maju.

Strategi pembangunan yang berorientasi ke dalam dengan membenahi keterbelakangan yang menandai keadaan negara dunia ketiga beserta permasalahan-permasalahan yang menggelutinya. Teori ketergantungan pada dasarnya menghendaki masyarakat yang lebih berkeadilan dengan berbagai cara dengan tiga pendekatan menurut (Bintoro dan Mustopadidjaja , 1986 : 53)

yaitu : a) *Marginal changes*, b) *Moderate changes* dan c) *Fundamental changes*.

Pembangunan daerah perbatasan dilakukan dengan memecahkan permasalahan keterbelakangan dan ketertinggalan agar tercipta pembangunan secara adil dan merata, umpamanya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini khususnya dalam upaya membuka keterisoliran desa-desa yang berada di daerah perbatasan dan daerah terpencil, dengan pembangunan infrastruktur berupa jalan. Pembangunan diarahkan pada peningkatan perannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi agar tercipta keterpaduan bangsa antar sektor dan wilayah guna memantapkan sistem transportasi nasional terpadu, tertib, lancar, aman, cepat terjangkau oleh masyarakat secara efektif, efisien dalam mendukung pola produksi dan distribusi nasional, pengembangan wilayah khususnya Kawasan Indonesia Timur serta sektor-sektor perekonomian lainnya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong peran aktif masyarakat.

RPJMN 2010-2014 unit kabupaten/kota perbatasan di arahkan pada aspek pengembangan ekonomi yang mencakup wilayah yang lebih luas dan borderless dengan orientasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya dan di fokuskan di 26 PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional).

Sementara unit kecamatan perbatasan di arahkan pada penguatan sabuk pertahanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana sosial dasar serta pemberdayaan masyarakat. Ini di fokuskan pada kecamatan perbatasan di 38 kabupaten/kota prioritas.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas permasalahan yang terdapat di daerah perbatasan sangatlah kompleks. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi merupakan persoalan yang mendapat perhatian khusus. Isu strategis permasalahan umum di wilayah perbatasan Kalimantan Utara khususnya Kabupaten Nunukan seperti dipaparkan Kepala Bappeda dalam Forum SKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2015 adalah :

- 1) Masih terbatasnya sarana prasarana dasar di bidang transportasi, antar Desa, Kecamatan dan ke Kabupaten.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan rendahnya SDM di daerah perbatasan dan pedalaman.
- 3) Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah dalam rangka memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- 4) Tingginya harga kebutuhan pokok khususnya daerah perbatasan dan pedalaman.
- 5) Rawan terjadinya degradasi rasa nasionalisme di masyarakat,

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, 'bottom-up' dan 'top down' dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pendekatan pembangunan dari atas kebawah (*top down*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) dalam (Sujatmoko, 1983 : 27) di jelaskan bahwa model pendekatan dari atas kebawah proses pembangunan bersifat sentralistik, tidak hanya dana-dana pembangunan tetapi juga perencanaan pembangunan ditentukan dari atas. Berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat dirumuskan dari dan oleh orang luar tanpa melibatkan masyarakat. Dalam model ini masyarakat ditempatkan sebagai obyek yang akan menerima dan menikmati hasil pembangunan.

Model *top down* mempunyai kelebihan dimana proses pembangunan dapat berjalan cepat dan target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai tepat pada waktunya, namun model ini sangat ditentukan oleh kemampuan penyediaan dana negara dan sangat ditentukan oleh kemauan dan kesungguhan aparat pemerintah dalam penyelenggaraannya. Posisi sentral yang mendominasi model pembangunan ini dapat melemahkan masyarakat dan menimbulkan hubungan tidak serasi. Disatu pihak lahir budaya perintah di kalangan pelaksanaan pembangunan dalam hal ini

pemerintah dan di pihak masyarakat akan lahir budaya diam dan menunggu.

Model top down kurang menguntungkan bagi kelangsungan proses pembangunan karena dalam proses pembangunan perlu adanya keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada seoptimal mungkin untuk melakukan pembangunan secara mandiri.

Model pendekatan dari bawah mempunyai kata kunci partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penentuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Model ini melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari masyarakat sendiri dengan merumuskan kebutuhan dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal, sehingga masyarakat lebih merasa memiliki dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan yang sudah tentu untuk kepentingan mereka sendiri. Namun model ini membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya.

Beberapa Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan seperti yang tertuang di dalam Rencana Strategis 2011

– 2016 Badan Pengelola Perbatasan Daerah antara lain:

- a. Melaksanakan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur di kawasan perbatasan
- b. Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur di kawasan perbatasan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Daerah Perbatasan
- d. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan

Hal ini sejalan dengan visi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yaitu “ Sebagai Koordinator Pengelola Pembangunan Perbatasan yang Handal dan terdepan “ dengan misi :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di kawasan perbatasan
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, propinsi dan pusat serta negara tetangga
- c. Meningkatkan infrastruktur perbatasan guna membuka keterisolasian kawasan perbatasan
- d. Meningkatkan dan mengembangkan potensi kawasan perbatasan

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam bidang kebijakan publik yang mengkaji tentang kebijakan pembangunan daerah perbatasan mulai berkembang, berikut ini beberapa hasil studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

a. Aziz Budianta (2010)

Aziz Budianta (2010) menulis jurnal dengan judul “ Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia “ menyimpulkan bahwa untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan masih perlu dilakukan penelitian mendalam untuk menemukan faktor-faktor penyebab lambatnya pertumbuhan daerah perbatasan dalam berbagai aspek kewilayahan. Aspek yang perlu dikaji lebih lanjut menurut Aziz Budianta adalah karakteristik potensi wilayah (terutama potensi fisik wilayah), kondisi sosial ekonomi, sosial budaya penduduk setempat, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan

penduduk serta kebijaksanaan pembangunan daerah perbatasan dan perumusan strategi pengembangan yang tepat secara umum dan lokal.

Aziz Budianta juga menyimpulkan bahwa pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan identik dengan pengembangan perdesaan yang berbasis pada sektor usaha pertanian namun dalam implementasinya masih banyak terdapat kesulitan untuk memadukan berbagai macam program dan proyek pemerintah daerah yang dikelola oleh berbagai macam instansi terkait, sehingga masih terkesan tumpang tindih proyek pemerintah. Padahal untuk menghasilkan kemajuan yang cukup signifikan di daerah perbatasan perlu sinergi keterpaduan program dan proyek instansional.

b. Werenfenridus Taena (2009)

Werenfridus Taena (2009) melakukan penelitian dengan judul Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, menyimpulkan bahwa pengembangan ekonomi wilayah perbatasan membutuhkan sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya sosial dan pengembangan kapasitas produksi aktivitas ekonomi namun karena pendanaan yang terbatas mengharuskan pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas pengembangan sumber daya agar dapat memperoleh manfaat ekonomi yang tinggi. Prioritas pembangunan berdasarkan persepsi stakeholder adalah pengembangan sumber daya manusia dibanding sumber daya pembangunan lainnya

karena sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat membantu mengembangkan sumber daya pembangunan lainnya.

Pengembangan sumber daya manusia akan mampu menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan, namun pengembangan perekonomian wilayah perbatasan akan lebih terarah dan tepat sasaran serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan bila dikembangkan menjadi kawasan agropolitan karena sumber daya lahan yang masih memungkinkan untuk dikembangkan. Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan berdasarkan persepsi stakeholder. Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan berdasarkan persepsi stakeholder harus didukung dengan hasil analisis kualitatif terutama untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan di wilayah perbatasan yang menurut persepsi stakeholder lebih tepat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan.

c. Purwanto dan Syawie (2013)

Purwanto dan Syawie (2013) melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah Perbatasan Antar Negara (Studi Kasus Kabupaten Sambas). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mendalami kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam,

observasi lapangan dan dokumentasi. Purwanto dan Syawie menulis bahwa kondisi wilayah perbatasan di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas masih terbatas dalam infrastruktur begitu juga potensi alam belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Keterbatasan aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Implementasi kebijakan pembangunan khususnya dalam hal pembangunan daerah perbatasan masih dihadapkan pada sulitnya koordinasi dan sinergi keterpaduan program lintas sektor serta sulitnya transportasi dan dukungan infrastruktur masuknya program pembangunan daerah perbatasan. Dalam pelaksanaan pembangunan peran dan keterlibatan masyarakat masih sangat rendah sehingga masyarakat sangat merasakan bahwa mereka menjadi penonton pembangunan di daerah sendiri.

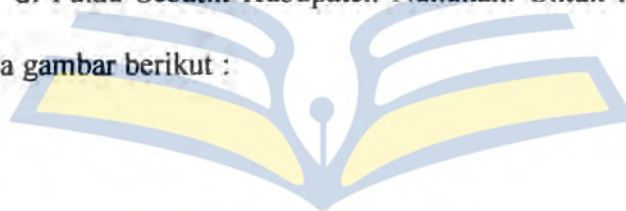
Persamaan penelitian ini Jurnal yang ditulis Purwanto dan Syawie mempunyai persamaan dengan penulisan ini yaitu bagaimana pembangunan di daerah perbatasan yang meningkatkan kesejahteraan dan memihak masyarakat di daerah perbatasan.

B. Kerangka Pemikiran

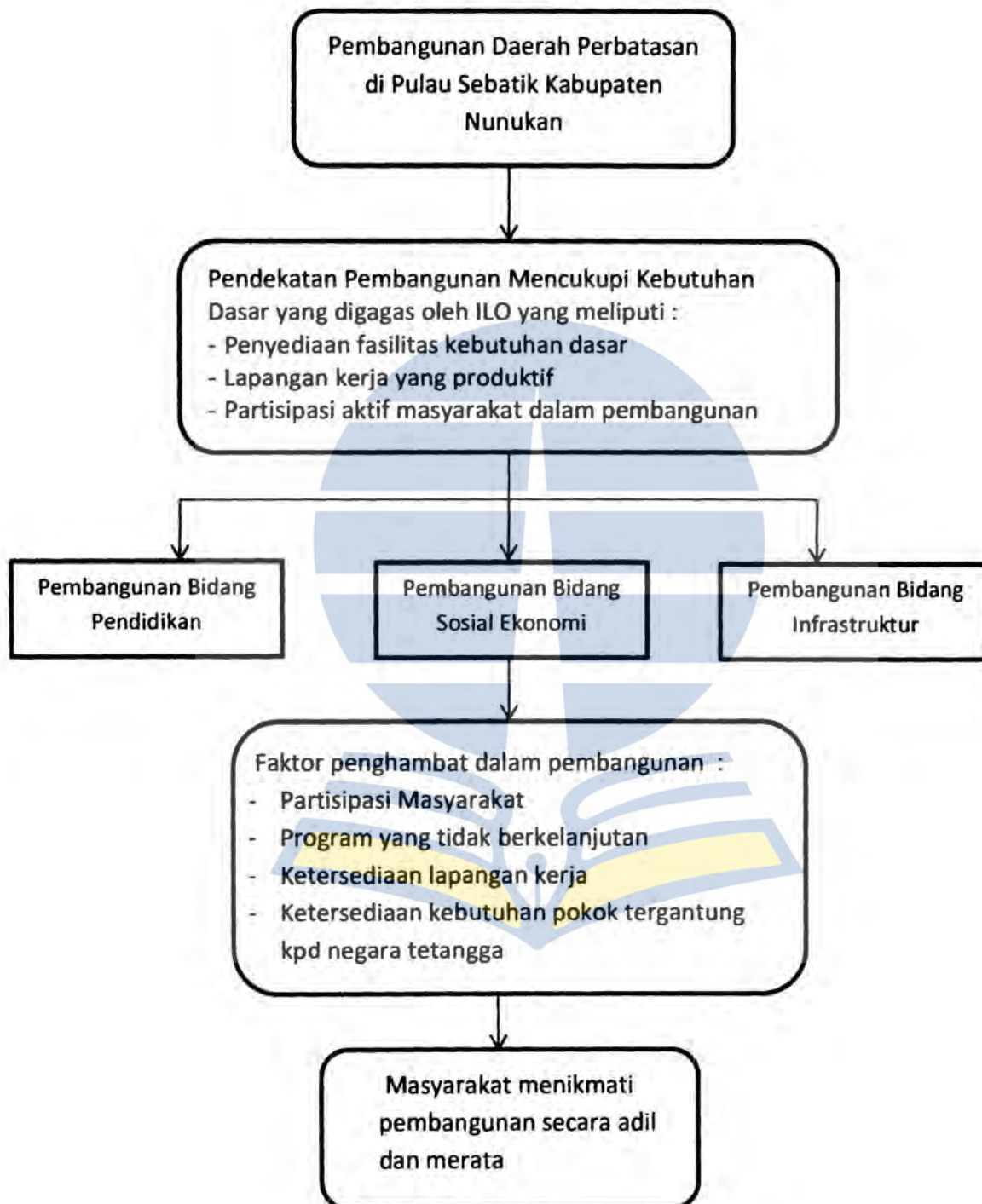
Berdasarkan konsep dan teori pembangunan diatas maka yang akan dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah pendekatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar oleh Bintoro dan Mustopadidjaja yang berorientasi

pada penyediaan secara langsung kebutuhan dasar meliputi penyediaan jasa kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), Lapangan kerja yang produktif dalam memenuhi sandang, pangan, permukiman dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Defenisi konsepsional dalam penelitian ini yang juga merupakan batasan terhadap penelitian yang dilakukan adalah bagaimana pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik khususnya di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara dengan pendekatan pembangunan memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang infrastruktur, bidang sosial budaya dan bidang pendidikan yang sudah berkelanjutan dan memihak rakyat serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan memenuhi kebutuhan dasar pada bidang infrastruktur, bidang sosial ekonomi dan bidang pendidikan di tiga kecamatan yang menjadi lokus penelitian di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Sumber : Pendekatan Pembangunan dari ILO serta berbagai sumber

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Nazir (2005:84) adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan menurut Sarwono (2006:79) desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka dapat dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yang memihak rakyat dan berkelanjutan serta menganalisis faktor penghambat pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yang memihak rakyat dan berkelanjutan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dilakukan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yang terdiri dari 5 kecamatan, sebagai lokasi dari penelitian yang dilakukan penulis diantaranya lokasi Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Barat. Lokasi ini dipilih karena berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan, dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara mendalam dari suatu informan lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi. Dengan kata lain bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditentukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai.

Dalam pengambilan informasi dalam penelitian menggunakan *Purposive Sampling*. Dimana dalam metode ini peneliti menggali informasi dari informan atau orang yang diyakini mengetahui banyak hal yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. Sesuai dengan pendapat lapangan. Yang demikian karena pengumpulan data suatu penelitian mempunyai tujuan tercapainya kualitas data yang memadai, sehingga sampai dengan responden yang beberapa data telah dalam keadaan tidak berkualitas lagi dalam arti data mencapai titik jenuh karena informan tersebut tidak lagi memberi informasi baru. Peneliti hanya mengemukakan bagaimana cara memperoleh jumlah responden yang dibutuhkan dalam memperoleh data peneliti menggunakan data primer yaitu dengan cara langsung bertanya kepada responden. Moleong

(2012:132) bahwa berapa jumlah informan dalam penelitian kualitatif belum diketahui sebelum peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan

Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah kelompok sasaran dan pembuat program: Kabid Infrastruktur pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Camat di 3 Kecamatan (Sebatik Tengah, Sebatik Utara, Sebatik Barat) dan Kepala Desa/Tokoh Masyarakat.

D. Instrumen Penelitian

Sebagai instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Hal ini perlu diuraikan lebih detil dilakukan dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti sendiri yang melakukan *Indept Interview* (wawancara mendalam), termasuk dalam menyiapkan bahan wawancara atau pertanyaan berkenaan hal-hal yang akan ditanyakan. Bahan wawancara ini akan memudahkan peneliti dalam mengarahkan pertanyaan saat dilakukan wawancara terhadap para informan, dan tentu akan berkembang sesuai wawancara yang dilakukan.

Adapun alat bantu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kamera, tape recorder, dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan masalah penelitian serta alat bantu lainnya.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan

Penulis menggunakan fasilitas perpustakaan digital UT sebagai tempat untuk menggali dan mempelajari literatur-literatur mengenai konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini serta buku-buku ilmiah, laporan-laporan dan lain-lain.

2. Penelitian Lapangan yaitu penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan yang menjadi objek dari penulisan Tesis ini, dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara/Interview

Merupakan alat untuk *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Menurut Sutopo (2006:72) wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam

wawancara ini penulis mengadakan tanya jawab secara langsung baik secara formal maupun non formal dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang akan dibahas.

b. Observasi lapangan langsung

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti turun ke lapangan dengan mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian yaitu mendeskripsikan pembangunan daerah perbatasan yang berkelanjutan dan memihak rakyat.

c. Dokumentasi (documentation)

Menurut Sugiyono (2009 : 41) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa-peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau menemukan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

F. Metode Analisis Data

Data – data yang diperoleh dari informan serta untuk memudahkan dan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang bisa dibaca dan dimengerti peneliti akan menguji data dengan teknis analisa data kualitatif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data

yaitu : *Data CondensationI*, *Data Display* dan *Conclusion Drawing/Verifications*.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan dan atau menstranformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

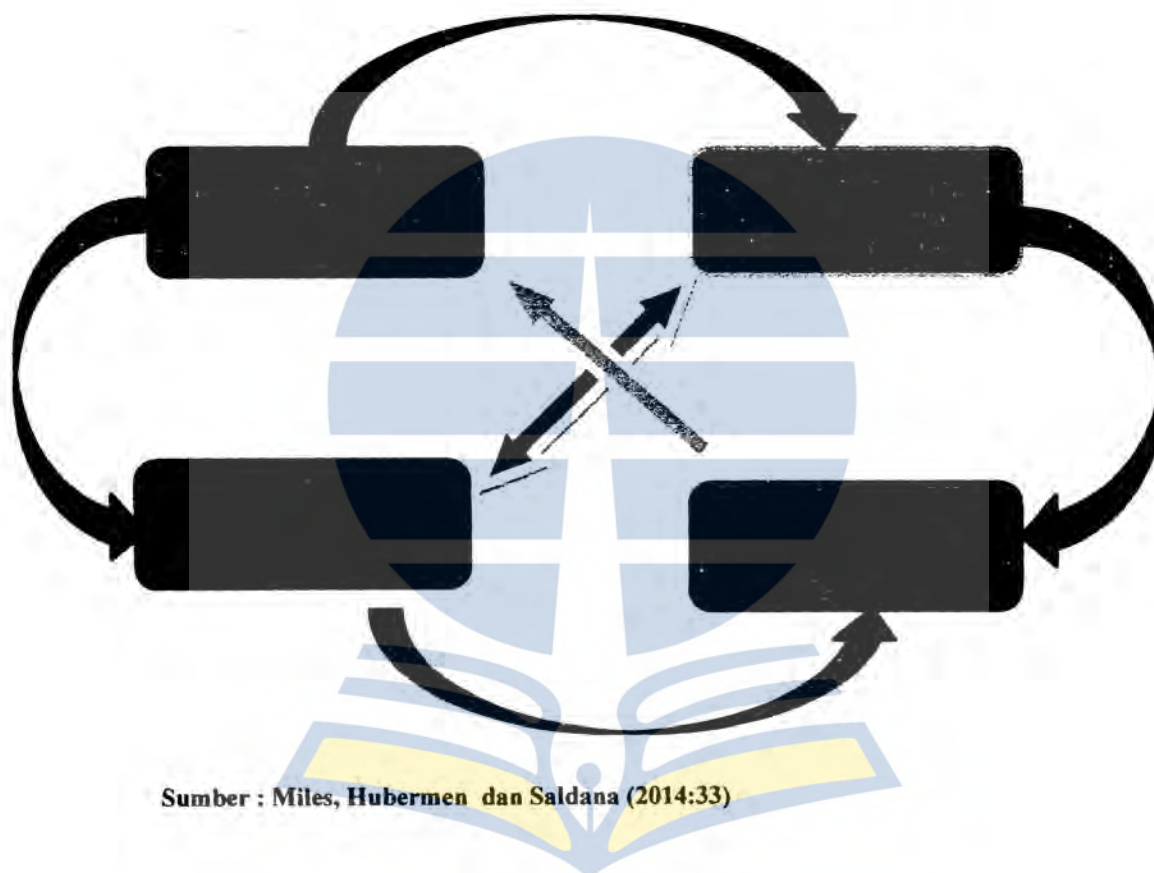
Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menari kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

Untuk lebih jelasnya model analisis data menurut Miles dan Huberman seperti pada gambar berikut :

Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles dan Huberman



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Administratif

Secara Geografis Kabupaten Nunukan terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan wilayah paling utara Propinsi Kalimantan Utara. Posisi Kabupaten Nunukan berada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia)

Kabupaten Nunukan terbagi dalam 16 kecamatan dimana 5 kecamatan berada di Pulau Sebatik. Secara administratif Pulau Sebatik dibagi dua bagian yaitu bagian Utara seluas 187,23 Km² merupakan wilayah Malaysia Timur (Sabah) sedangkan bagian Selatan seluas 246,61 Km² merupakan wilayah Indonesia (Kabupaten Nunukan). Pulau Sebatik yang masuk wilayah Indonesia Propinsi Kalimantan Utara Kabupaten

Nunukan dibagi dalam 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dengan Kecamatan Sebatik Timur. Dari lima kecamatan itu tiga diantaranya berbatasan darat langsung dengan Tawau Negara Malaysia yaitu Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah dengan luas wilayah masing-masing seperti pada tabel berikut :

Tabel. 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Tengah dan Sebatik Barat

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Kecamatan Sebatik Utara	15,39
2	Kecamatan Sebatik Barat	93,27
3	Kecamatan Sebatik Tengah	47,71

Sumber : Nunukan dalam Angka Tahun 2015

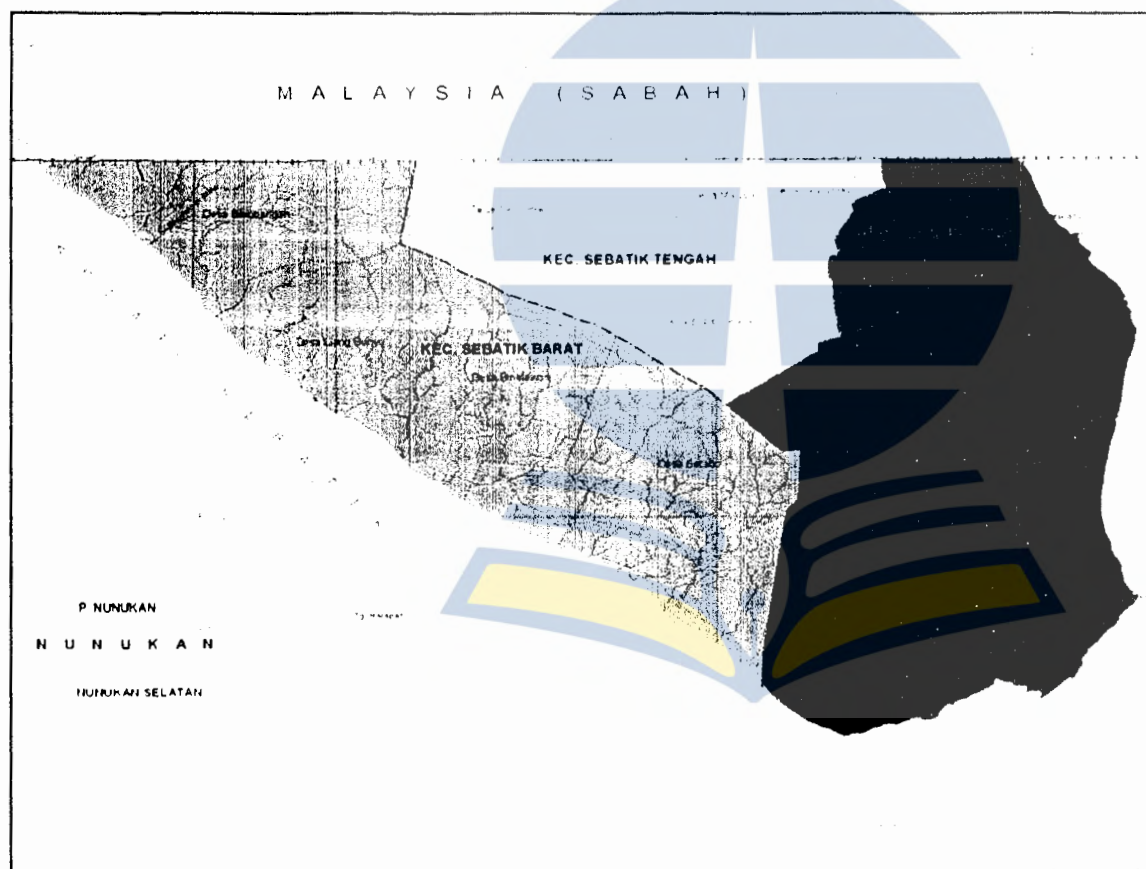
Berdasarkan Tabel 4.1 diatas nampak bahwa kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Sebatik Barat yaitu berkisar 93,39 Km², dengan batas-batas tiap kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Sebatik Utara
 - Sebelah Timur : Sabah Malaysia Timur
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Sebatik Timur
 - Sebelah Barat : Kecamatan Sebatik Tengah

- Sebelah Utara : Sabah Malaysia Timur
- Kecamatan Sebatik Tengah
 - Sebelah Timur : Sabah Malaysia Timur
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur
 - Sebelah Barat : Kecamatan Sebatik Barat
 - Sebelah Utara : Kecamatan Sebatik Barat
- Kecamatan Sebatik Barat
 - Sebelah Timur : Sabah Malaysia Timur
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Sebatik
 - Sebelah Barat : Laut Sulawesi
 - Sebelah Utara : Selat Sebatik



Gambar 4.1
Peta Administrasi Kecamatan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan
 ADMINISTRASI KECAMATAN DI PULAU SEBATIK
 KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



KETERANGAN :

- Batas Negara
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kecamatan Sebatik Barat : | Kecamatan Sebatik Timur : |
| Desa Banturagan | Desa Ser. Hutanok |
| Desa Banturagan | Desa Tanjung Harapan |
| Desa Banturagan | Desa Bukit Aca Indah |
| Desa Sebatik | Desa Tanjung Aca |
| Kecamatan Sebatik Utara : | Kecamatan Sebatik Tengah : |
| Desa Ser. Hutanok | Desa Ser. Hutanok |
| Desa Lapang | Desa Harapan |
| Desa Sebatik | Desa Ajikmanan |
| Kecamatan Sebatik : | Desa Bukit Harapan |
| Desa Bukit | |
| Desa Ser. Hutanok | |
| Desa Tanjung Harapan | |
| Desa Belantok | |

INDEKS PETA



PEMERINTAH
KALIMANTAN TIMUR

2. Topografi dan Iklim

Keadaan topografi Pulau Sebatik bervariasi terdiri atas cekungan, (daerah pasang surut, rawa-rawa, endapan pantai, laut) teras laut dan daratan, perbukitan, daerah bergelombang dan bergunung. Dataran pantai mempunyai kemiringan lereng sebesar kurang dari 2 persen, wilayah cekungan (rawa dan teras laut) dengan kemiringan 2- 25 persen, daerah perbukitan dan pegunungan tengah dengan kemiringan 25 – 40 persen. Wilayah pesisir pantai Pulau Sebatik didominasi oleh vegetasi mangrove, sedangkan wilayah pegunungan dibagian tengah ditumbuhi oleh hutan sekunder dan sebagian dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Wilayah Pulau Sebatik mempunyai ketinggian 0-500 m dpl dengan perincian 10 persen wilayah ketinggiannya 0-50 m dpl, 75 persen ketinggiannya 50-150 m dpl dan 15 persen wilayah ketinggiannya 150-500 m dpl. Ketinggian maksimum terdapat di pegunungan tengah Pulau Sebatik yaitu 500 m dpl.

Daerah Pulau Sebatik terletak di daerah khatulistiwa, oleh karena itu dipengaruhi iklim tropis basah dengan karakteristik khas yaitu curah hujan yang cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun. Dengan demikian wilayah Pulau Sebatik tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

3. Kependudukan

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta penduduknya sebagai subjek pembangunan, demikian pula dengan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara. Jumlah penduduk yang besar disatu sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi pula.

Jumlah penduduk di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2014 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Penduduk (Jiwa)			Jumlah KK
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sebatik Utara	3	2796	2687	5483	1498
2	Sebatik Barat	4	4077	3531	7606	1839
3	Sebatik Tengah	4	3776	3345	7121	1329

Sumber : Nunukan Dalam Angka Tahun 2015

Pada Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di tiga kecamatan ini pada akhir Bulan Desember Tahun 2014 berjumlah kira - kira 20.210 jiwa dengan jumlah KK mencapai 4.666. Berdasarkan jenis

kelamin penduduk di ketiga kecamatan diatas maka jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan yang berjumlah 10.649 jiwa penduduk sedangkan perempuan berjumlah 9.563 jiwa yang bermukim di 11 desa.

Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran penduduk di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara menurut luas wilayah belum merata sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk antara ketiga kecamatan ini seperti pada tabel berikut :

Tabel. 4.3
Kepadatan penduduk di Kecamatan Sebatik Barat , Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2014

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM)
1	Kecamatan Sebatik Utara	356,27
2	Kecamatan Sebatik Barat	81,55
3	Kecamatan Sebatik Tengah	149,26

Sumber : Nunukan dalam Angka 2015

Pada Tabel 4.3 diatas nampak bahwa Kecamatan Sebatik Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 356,27 jiwa/Km² diikuti Kecamatan Sebatik Tengah yaitu 149,26 jiwa/Km² dan Kecamatan Sebatik Barat paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 81,55 jiwa/km² sedangkan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Sebatik Barat.

4. Perekonomian

Sebagai wilayah kecamatan yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Sabah Malaysia, maka tipologi perekonomian masyarakat di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara dipengaruhi oleh Tawau Malaysia. Hampir semua kebutuhan pokok masyarakat bergantung pada pasokan dari Malaysia karena faktor dekatnya wilayah serta mudahnya mendapatkan produk dari negari jiran tersebut.

Demikian juga penjualan hasil pertanian dan perikanan wilayah pemasarannya ke Malaysia karena harga jual yang kompetitif dan ongkos angkut lebih murah jika dibandingkan menjual ke Nunukan atau Tarakan. Meski demikian arus keluar masuknya barang dari dan ke Pulau Sebatik dilakukan secara ilegal oleh masyarakat yang secara langsung tidak memberikan masukan devisa bagi negara maupun daerah.

5. Pendidikan dan Kesehatan

sebagai sektor yang berperan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan motor penggerak pembangunan pada bidang-bidang lainnya. Pemerintah di Kabupaten Nunukan telah berupaya untuk memenuhi segala infrastruktur fasilitas/sarana pendidikan, mutu pendidikan baik pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas namun sebagian kecil masyarakat di Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat

belum bisa menikmatinya. Fasilitas pendidikan di ketiga kecamatan ini seperti pada tabel berikut :

Tabel. 4.4
Fasilitas Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan
Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan
Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2014

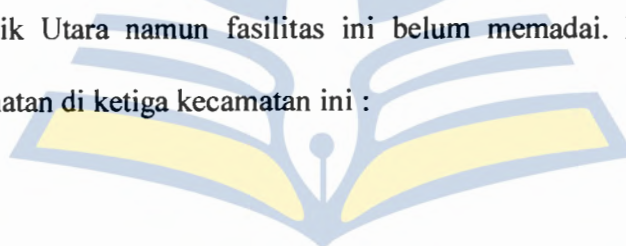
No	Keterangan	Fasilitas Pendidikan							
		TK		SD		SMP		SMA/ SMK	
		Swasta	Negri	Swasta	Negri	Swasta	Negri	Swasta	Negri
1	Kecamatan Sebatik Barat								
	- Jumlah Sekolah	2	-	2	6	-	2	-	1
	- Jumlah Siswa	51	-	97	1.090	-	420	-	280
	- Jumlah Guru	10	-	13	67	-	34	-	27
2	Kecamatan Sebatik Utara								
	- Jumlah Sekolah	2	-	1	2	1	1	1	-
	- Jumlah Siswa	47	-	129	594	72	792	72	-
	- Jumlah Guru	9	-	12	35	10	28	3	-
3	Kecamatan Sebatik Tengah								
	- Jumlah Sekolah	2	-	-	6	-	2	-	1
	- Jumlah Siswa	71	-	-	963	-	397	-	268
	- Jumlah Guru	5	-	-	64	-	21	-	16

Sumber : Nunukan dalam angka Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas nampak bahwa fasilitas pendidikan di tiga kecamatan yang menjadi lokus penelitian penulis relatif sudah terpenuhi. Untuk pendidikan dasar dan lanjutan (SD sampai SMA) didominasi oleh pemerintah kecuali di Kecamatan Sebatik Utara swasta turut berperan dalam pendidikan lanjutan. Adapun di tingkat TK pemerintah belum menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai baik

sekolah maupun guru, dan pada tingkatan ini peran swasta lebih dominan. Pada Tabel 4.4 diatas nampak juga bahwa jumlah anak didik untuk tingkat TK paling banyak di Kecamatan Sebatik Tengah yaitu 71 anak, sedangkan untuk tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Sebatik Barat memiliki jumlah siswa yang paling banyak yaitu 1.187 anak yang belajar di delapan sekolah dasar dan untuk tingkat SMP Kecamatan Sebatik memiliki siswa palung banyak yaitu 854 siswa.

Sektor kesehatan juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan investasi untuk mendukung pembangunan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah berusaha sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara namun fasilitas ini belum memadai. Berikut ini fasilitas kesehatan di ketiga kecamatan ini :



Tabel. 4.5

Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2014

NO	Fasilitas Kesehatan	Kec. Sebatik Barat	Kec. Sebatik Tengah	Kec. Sebatik Utara
1	RSUD	-	-	-
2	RSU Swasta	-	-	-
3	RS Khusus	-	-	-
4	Puskesmas Induk	1	1	1
5	Puskesmas Pembantu	8	10	9
6	Puskesmas Keliling	-	-	-
7	Klinik/Dokter Praktek	-	-	-
8	Posyandu	11	5	17
9	Bidan Praktek	-	1	-

Sumber : Nunukan dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4. 5 diatas nampak bahwa di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara belum memiliki Rumah Sakit Umum pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta, begitu juga dengan Klinik/Dokter praktek belum ada sama sekali sehingga jika ada pasien yang perlu perawatan lanjut dan perlu dirujuk dari puskesmas ke Rumah Sakit harus di bawa ke Nunukan atau Tawau yang memiliki Rumah Sakit dengan fasilitas lebih lengkap.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

Daerah Perbatasan sebagai bagian beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan permasalahan yang kompleks harus segera mendapatkan perhatian dan solusi dalam penanganan masalah perbatasan dalam memajukan kawasan perbatasan Indonesia karena daerah perbatasan merupakan bagian dari gambaran pembangunan Indonesia. Pembangunan infrastruktur di suatu daerah, khususnya di perbatasan antar negara seperti di Pulau Sebatik (Indonesia) Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten telah melaksanakan berbagai program pembangunan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, pemerataan pembangunan sehingga kesejahteraan dapat tercapai dan keamanan masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik terjaga dengan baik.

Pembangunan infrastruktur di suatu daerah, khususnya di perbatasan antar negara seperti di Pulau Sebatik merupakan suatu keniscayaan. Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan dan cerminan citra Indonesia bagi negara tetangga. Model dan warna pembangunan di perbatasan bagaikan *performace* bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu semakin baik pembangunan di daerah perbatasan maka semakin positif pandangan negara tetangga terhadap Indonesia.

Salah satu aspek dalam pendekatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar adalah pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan permukiman. Di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara kebutuhan sandang, pangan dan permukiman sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada data penduduk fakir miskin pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Jumlah fakir miskin di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Fakir Miskin
1	Kecamatan Sebatik Barat	-
2	Kecamatan Sebatik Tengah	-
3	Kecamatan Sebatik Utara	-

Sumber : Nunukan dalam Angka Tahun 2015

Pada tabel 4.6 diatas nampak bahwa masyarakat di tiga kecamatan yang merupakan lokasi penelitian sudah tidak ada yang dalam kategori fakir miskin yang belum memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan permukiman.

Namun dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk menyediakan fasilitas memenuhi kebutuhan dasar masyarakat banyak yang tidak tepat sasaran, tidak memihak rakyat dan tidak berkelanjutan. Berikut ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah

dan Kecamatan Sebatik Utara yang meliputi : Pembangunan dalam bidang infrastruktur, Pembangunan dalam bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan dalam bidang pendidikan yang akan dibahas menggunakan pendekatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar.

a. Pembangunan dalam Bidang Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan totalitas pembangunan daerah karena infrastruktur merupakan sarana pokok yang menunjang bagi kemudahan operasional bagi masyarakat. Semakin baik pembangunan infrastruktur (prasarana) wilayah maka semakin baik dinamika perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Sebatik Barat dalam bidang infrastruktur khususnya jalan penghubung antara desa dan kecamatan sudah cukup baik namun perlu alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan yang sudah rusak. Seperti jalan poros dari Mantikas menuju Sei. Nyamuk sudah banyak yang rusak dan berlubang, dengan kondisi jalan seperti ini sudah pasti berbahaya bagi masyarakat yang melewatinya apalagi jika malam hari karena belum ada penerangan jalan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Kasi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sebatik Barat dalam wawancara penulis yaitu :

“Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Sebatik Barat sudah cukup baik namun perlu diperhatikan pemeliharaan jalan yang rusak demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melewatinya.” (Wawancara 11 April 2016).

Hasil verifikasi di lapangan bahwa masyarakat juga masih mengharapkan pembangunan jalan tani yaitu jalan dalam perkebunan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat adalah petani jadi mereka sangat membutuhkan akses jalan untuk mengangkut hasil kebun mereka untuk dijual karena hasil kebun masyarakat Sebatik sebagian besar dijual ke Tawau - Malaysia seperti Kelapa Sawit, Pisang, Cacao dan hasil usaha tani lainnya. Masyarakat menjual kelapa sawit ke tawau sebab di Nunukan belum ada pabrik kelapa sawit (PKS) sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Desa Bambang dalam wawancara penulis berikut :

“ Kami mengharapkan agar akses jalan ke kebun kelapa sawit kami dibuka agar memudahkan untuk mengangkut hasil kebun karena jika lambat maka harga jual kelapa sawit ke Tawau akan berkurang dengan alasan pengumpul sawitnya sudah lama “. (Wawancara, 11 April 2016).

Berbeda dengan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Sebatik Utara, bahwa jalan penghujung antar desa masih *jalan tikus*. Untuk meningkatkan kapasitas jalan masyarakat mengusulkan pembukaan badan jalan dengan panjang sekitar 8 Km. Hasil verifikasi penulis di lapangan bahwa seringkali pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan usulan masyarakat saat musrenbang . Hal ini diindikasikan dengan pembangunan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat dan tidak dapat

dimanfaatkan sebagaimana ucapan Kepala Desa Sei Nyamuk pada saat wawancara dengan penulis bahwa :

“Pembangunan yang dilaksanakan di sini lewat reses DPR tidak pernah kami usulkan seperti semenisasi diantara kebun warga padahal sudah ada jalan poros dan waktu pelaksanaan pembangunan ini tidak pernah dilaporkan pada kami, usulan prioritas kami di musrenbang desa tidak direalisasikan. Tiba-tiba ada kegiatan di desa kami katanya proyek anggota dewan x dan lebih aneh lagi pada papan proyek lokasi pelaksanaan desa lain bukan di desa kami. Artinya kegiatan ini dipaksakan saja dilaksanakan daripada uang kembali katanya”. (Wawancara 12 April 2016).

Senada dengan hal tersebut diatas, Sekertaris Camat Sebatik Utara menyatakan bahwa masyarakat sangat mengharapkan pembukaan badan jalan antar desa sebagai akses penghubung antar desa. Pembukaan badan jalan ini sudah diusulkan setiap tahun namun belum direalisasikan hingga kini. Kenyataannya bahwa beberapa kegiatan pembangunan yang sebenarnya tidak terlalu prioritas namun dilaksanakan akhirnya program ini tidak dimanfaatkan masyarakat dan hanya memboroskan anggaran, misalnya pelaksanaan proyek reses DPR. Wawancara dengan Sekertaris Camat Kecamatan Sebatik Utara terungkap bahwa :

“Pelaksanaan proyek PL sebagai realisasi reses DPR tidak bisa dinikmati masyarakat karena terkesan proyek yang dipaksakan dan hanya untuk keuntungan tim sukses, semenisasi dilaksanakan sampai di kebun kelapa sawit penduduk jadi jika mobil pengangkut kelapa sawit lewat maka paling lama sebulan semenisasi sudah hancur, padahal semenisasi seharusnya di pemukiman penduduk yang padat. “ (Wawancara 12 April 2016).

Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sebagai akses untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang belum terpenuhi di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah. Jalan penghubung antar beberapa desa di Kecamatan Sebatik Utara belum ada, jalan menuju sekolah-sekolah dan menuju lokasi perkebunan masyarakat belum memadai. Begitu juga jalan lingkar Pulau Sebatik perlu pemeliharaan agar masyarakat nyaman dan bisa mengakses tempat tujuan lebih cepat.

Mekanisme usulan masyarakat dari tingkat RT sampai musrenbang kabupaten sudah sesuai prosedur namun realisasi pelaksanaan usulan masyarakat belum sesuai skala prioritas. Ada kegiatan yang diusulkan tidak direalisasikan dan ada juga pembangunan yang tidak diusulkan namun dilaksanakan. Dalam hal ini belum terpenuhi penyediaan jasa kebutuhan dasar yaitu akses jalan karena partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri yang merupakan salah satu aspek dalam pendekatan pembangunan memenuhi kebutuhan dasar belum terlaksana. Masyarakat umum tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan melalui reses DPR utamanya dalam penentuan lokasi pembangunan dan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang dampaknya pembangunan tersebut tidak membantu masyarakat, tidak bermanfaat secara optimal dan tidak tepat sasaran. Masyarakat

mengharapkan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah menuju ke arah yang lebih baik, dari tidak ada menjadi ada, dari kondisi jalan yang tidak baik ditingkatkan menjadi lebih baik menuju kearah kemajuan dan perubahan dalam infrastruktur jalan sebagai akses masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Begitu juga dengan akses jalan menuju kantor camat perlu peningkatan agar masyarakat lebih nyaman dalam pencapaian karena kondisi jalan ke Kantor Kecamatan Sebatik Tengah masih agregat dan belum pengaspalan. Kondisi medan Kecamatan Sebatik Tengah yang agak berat mengharuskan akses jalan menjadi prioritas utama menuju sarana pelayanan umum seperti menuju puskesmas, pustu, kantor desa. Oleh karena itu dalam menentukan lokasi pembangunan infrastruktur harus ada komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, seperti pembangunan pustu di Desa Maspul tidak pernah digunakan sampai bangunannya sudah mulai rusak karena lokasinya yang sulit diakses karena jauh dari pemukiman dan berada di daerah rawan longsor. Berikut ini informasi dari Kepala Desa Maspul berdasarkan wawancara penulis:

“ Pustu yang dibangun di desa kami belum pernah digunakan sampai gedungnya sudah mau rusak, karena lokasinya yang jauh dari pemukiman masyarakat dan lagi daerah itu rawan longsor jadi petugas juga takut mau tinggal di situ. Pemerintah Kabupaten tidak mengkomunikasikan dengan kami masalah lokasi pembangunan pustu mereka langsung

bangun saja akhirnya tidak bisa digunakan juga.” (Wawancara tanggal 11 April 2016).

Tidak jauh berbeda dengan kondisi pembangunan pustu di Kecamatan Sebatik Tengah pembangunan puskesmas di Kecamatan Sebatik Utara pun demikian halnya. Pelaksanaan pembangunan puskesmas ini tidak melibatkan pihak kecamatan yang lokasi pembangunanya di wilayah mereka serta para medis sebagai pengguna gedung ini sehingga pembangunan puskesmas ini tidak seperti yang diharapkan, berikut informasi dari Sekertaris Camat Kecamatan Sebatik Utara dalam wawancara penulis :

“Pembangunan puskesmas di Kecamatan Sebatik Utara yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum WCnya tidak sesuai standar kesehatan tidak memiliki septic tank padahal sudah penyerahan bangunan dari kontraktor pelaksana. Hal ini terjadi karena tidak ada kordinasi dengan pihak kecamatan yang mengetahui permasalahan di lapangan dan juga kepala puskesmas tidak dilibatkan sebagai pengguna gedung ini nantinya.” (Wawancara tanggal 11 April 2016).

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan diatas, dapat ketahui bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut teori pembangunan dengan pendekatan mencukupi kebutuhan dasar yang digagas oleh ILO (International Labor Organization) dalam Bintoro dan Mustopadidjaja, (1986 : 50) bahwa

salah satu aspek dalam pembangunan dengan pendekatan ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri. Pembangunan harus dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok lapisan masyarakat paling bawah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih dan usulkan sendiri. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dan atau masyarakat berperan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Kenyataannya pembangunan di lokus penelitian belum memperhatikan partisipasi masyarakat sehingga beberapa program pembangunan belum tepat sasaran dan belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Seperti pembangunan pustu di Kecamatan Sebatik Tengah dan puskesmas di Kecamatan Sebatik Utara yang dalam pelaksanaan pembangunannya khusus untuk menetapkan lokasi tidak melibatkan masyarakat dan para medis sebagai sasaran dan pengguna gedung ini sehingga lokasi pembangunannya pada lokasi yang tidak strategis dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga gedung ini dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya . Begitu juga dengan pembangunan puskesmas seharusnya para medis sebagai pengguna gedung dan pihak kecamatan dilibatkan dalam pembangunan ini agar bisa melaporkan perkembangan pembangunan ke kabupaten agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Maspul dan Kecamatan Sebatik Utara untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat sudah dilaksanakan pemerintah namun pembangunan fasilitas ini belum dinikmati masyarakat sebagaimana mestinya karena partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan ini diabaikan. Penentuan lokasi dan pengawasan pembangunan tidak melibatkan masyarakat sementara sasaran pembangunan ini adalah masyarakat.

Pada Kecamatan Sebatik Tengah pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan sudah cukup pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah lebih baik, namun kondisi geografis di Kecamatan Sebatik Tengah yang cukup sulit untuk dijangkau karena merupakan daerah perbukitan dan rumah penduduk masih berjauhan maka sangat dibutuhkan sarana transportasi untuk mengunjungi orang sakit yaitu ambulance, di puskesmas Kecamatan Sebatik Tengah hanya memiliki satu mobil ambulance seperti yang disampaikan sekretaris camat Kecamatan Sebatik Tengah kepada penulis :

“Untuk pelayanan kesehatan lumayan namun kendala kita di sini adalah kondisi wilayah Kecamatan Sebatik Tengah yang agak berat karena merupakan daerah perbukitan sementara mobil operasional puskesmas cuma satu dan wilayah kita menyebar jadi petugas mengalami hambatan dalam menjangkau masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan oleh karena itu perlu penambahan mobil operasional.” (Wawancara 11 April 2015).

Informasi dari Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah diatas menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang kesehatan belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan terutama masyarakat yang bermukim pada lokasi-lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau yang jauh dari Puskesmas.

Di Kecamatan Sebatik Barat Pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan sudah cukup, di kecamatan sudah ada puskesmas dan di tiap desa ada pustu serta beberapa desa memiliki polindes yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat namun perlu ada penambahan petugas di masing-masing polindes minimal 2 orang agar bila salah satu petugas berhalangan atau cuti masih ada petugas lainnya yang bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti yang disampaikan Kasi Kesejahteraan Kecamatan Sebatik Barat.

Meskipun pelayanan kesehatan sudah cukup baik namun masyarakat kadang-kadang tidak mengerti standar pelayanan di puskesmas, mereka sudah terbiasa berobat ke Tawau Malaysia sehingga menuntut pelayanan kesehatan di puskesmas sama dengan pelayanan di Rumah Sakit Tawau Malaysia. Oleh karena itu Pulau Sebatik sebagai daerah perbatasan perlu meningkatkan status puskesmas menjadi Rumah Sakit dengan melengkapi fasilitas pendukung agar masyarakat jangan selalu berorientasi ke negara tetangga untuk berobat dengan menganggap pengobatan di Malaysia lebih baik dari pada di negara kita.

Di Kecamatan Sebatik Barat masih ada beberapa wilayah yang belum menikmati jaringan listrik terutama di Desa Bambang. Informasi dari Kepala Desa Bambang bahwa dari 7 RT di desa tersebut 5 RT diantaranya sudah mendapat jaringan listrik namun belum semuanya hanya 70 persen saja sedangkan 2 RT sisanya belum mendapatkan jaringan listrik sama sekali.

Di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah, Kantor Camat belum mendapatkan jaringan listrik PLN. Untuk mendukung operasional pelayanan publik aparat setempat menggunakan genset setiap harinya. Sedangkan untuk masyarakat secara umum hampir semua telah menikmati penerangan listrik meskipun menggunakan listrik tenaga surya yang otomatis tergantung kepada cuaca. Berbeda dengan keadaan di Kecamatan Sebatik Utara, semua masyarakatnya sudah dapat menikmati jaringan listrik. Hasil observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara sudah bisa menikmati fasilitas penerangan listrik.

Untuk fasilitas air bersih masyarakat di ketiga kecamatan ini masih bergantung pada air hujan yang apabila musim kemarau tiba dan berkepanjangan mereka sangat sulit mendapatkan air bersih. Responsivitas Pemerintah pusat melalui bantuan mesin penyaring air laut menjadi air bersih di Kecamatan Sebatik Barat tidak dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat karena tidak mengetahui cara

menggunakan alat ini . Informasi dari Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sebatik Barat bahwa :

“Pemerintah pusat memberikan bantuan mesin penyaring air laut menjadi air bersih, sebenarnya alat ini sangat kami butuhkan tapi alat ini menggunakan listrik sedangkan kami diberikan pada saat listrik belum ada untuk sekarang listrik sudah ada namun masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan mesin ini jadi yah....beginilah mesinnya jadi pajangan saja dan jadi besi tua.” (Wawancara 12 April 2015).

Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sudah bagus dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat namun perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut. Pemberian bantuan tidak cukup hanya dengan memberikan alat saja namun perlu pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam penggunaan alat tersebut. Dalam hal ini aspek dalam pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan mencukupi kebutuhan dasar yang digagas oleh ILO yaitu penyediaan jasa dan pelayanan kebutuhan dasar penyediaan air bersih, pendidikan dan kesehatan belum terwujud untuk dinikmati masyarakat karena kurang memperhatikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka sendiri. Selain itu program pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bisa menjamin pemenuhan kebutuhan dasar perlu pendampingan dan evaluasi sejauh mana program tersebut dimanfaatkan dan membantu masyarakat.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam membangun kawasan perbatasan harus memperhatikan aspek partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan menyangkut lokasi, jenis infrastruktur yang akan dibangun, bantuan alat yang akan diberikan agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

b. Pembangunan dalam Bidang Sosial Ekonomi

Pembangunan kawasan perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan sudah dijalankan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Namun demikian, upaya percepatan pembangunan wilayah tersebut masih menghadapi kendala. Karena itu percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Pulau Sebatik tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh daerah tetapi juga harus mendapat perhatian dan prioritas dari Pemerintah Republik Indonesia dengan dukungan dan kerjasama seluruh jajaran kabinetnya.

Pembangunan sosial ekonomi adalah proses pembangunan yang berlangsung terus menerus dan bersifat dinamis. Pembangunan sosial ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna yakni memenuhi kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Pembangunan sosial merupakan proses pembangunan yang direncanakan dan diselaraskan dengan

pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan azas keadilan.

Kegiatan perekonomian Sebatik bergantung pada Kota Tawau yang jauh lebih sejahtera dibanding Pulau Sebatik. Salah satu masalah yang sulit ditangani saat ini adalah Tenaga Kerja Indonesia yang menjadikan Sebatik sebagai entry point bepergian ke Malaysia. Banyak TKI yang secara illegal masuk ke Malaysia untuk menyambung hidup, desakan ekonomi serta tidak jarang terbawa pada bisnis narkoba dan kriminalitas lainnya.

Masalah ekonomi memang mendominasi problematika masyarakat di Pulau Sebatik. Hal ini bisa dilihat dari adanya disparitas ekonomi masyarakat antara warga Indonesia dan warga Tawau - Malaysia, Tawau menjadi magnet yang begitu kuat menarik imigran Indonesia untuk berpindah dan mencari kehidupan di Malaysia. Masyarakat kedua negara serumpun ini rupanya memiliki rasa primodialisme tinggi namun minim nasionalisme. Tidak mengherankan bila ada warga negara Indonesia yang memiliki dua identitas yang berbeda untuk satu orang, penduduk yang memiliki KTP Indonesia dan juga memiliki IC (*Identity Card*) Malaysia, begitu pula pemakaian mata uang ringgit.

Untuk mengetahui kegiatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Sebatik Utara penulis melakukan wawancara kepada bapak Sekertaris Camat Sebatik Utara, beliau menjelaskan :

“Perekonomian masyarakat di Sebatik Utara bergantung pada kota Tawau yang jauh lebih sejahtera. Masyarakat melakukan transaksi jual beli ke Tawau (Malaysia), masyarakat menjual hasil perkebunan seperti pisang, cacao, kelapa sawit begitu juga dengan hasil perikanan semua di jual ke tawau. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat kami bergantung pada produk malaysia seperti gas, gula dan minyak makan.” (Wawancara 12 April 2016).

Hal yang sama disampaikan oleh Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah bahwa perekonomian di daerah mereka sangat tergantung oleh Tawau Malaysia oleh karena itu mata uang yang beredar adalah Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia. Secara geografis Pulau Sebatik lebih dekat ke Tawau yang hanya ditempuh untuk menyebrang dalam waktu 8 menit bila dibandingkan menyebrang ke Nunukan yang memakan waktu 20 menit dengan alat transportasi yang sama dengan ongkos dua kali lipat. Sementara barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dilarang diperjual belikan di daerah perbatasan. Berikut ini daftar barang kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara yang dilarang diperjual belikan.

Tabel 4.6
Daftar barang kebutuhan sehari-hari masyarakat Sebatik yang
dilarang diperjual belikan di daerah perbatasan

No	Nama Barang	Keterangan
1	Bahan Bakar, Solar dan Premium	Semua barang tersebut dilarang untuk diperjual belikan melalui lintas batas negara, namun karena ketersediannya kurang maka barang-barang tersebut dijual secara ilegal di daerah Sebatik
2	Minyak Goreng	
3	Minyak Tanah	
4	Gula	
5	Tepung Terigu	
6	Sabun Mandi	
7	Beras	
8	Kopi	
9	Teh	
10	Kecap	
11	Milo	
12	Gas Elpiji	
13	Semen	
14	Besi	
15	Seng	
16	Keramik	
17	Pipa Air	
18	Indomie	
19	Sarden	

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan Tahun 2016

Daftar barang pada pada tabel 4.6 diatas yang dilarang diperjual belikan di wilayah perbatasan merupakan barang – barang kebutuhan pokok dan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup masyarakat perbatasan di lokus penelitian namun untuk mendapatkan barang-barang tersebut di ketiga kecamatan ini di Pulau Sebatik tidak susah karena transaksi jual beli Tawau - Sebatik dilakukan setiap hari dan hubungan yang baik antar sesama pedagang kedua negara ini meskipun perdagangan dilakukan secara ilegal. Sementara untuk mengharapkan barang produk dalam negeri persediaannya tidak mencukupi kebutuhan

masyarakat, walaupun harga barang -- barang dari Tawau Malaysia relatif mahal namun tetap dibeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi di Kecamatan Sebatik Barat agak sedikit berbeda dibanding di Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah. Letak geografis Kecamatan Sebatik Barat yang relatif dekat dengan Kota Nunukan sebagai ibukota kabupaten menjadikan perekonomian di kecamatan ini tidak terlalu dipengaruhi oleh Tawau Malaysia. Masyarakat menjual hasil perkebunan dan rumput laut ke Nunukan seperti rumput laut yang merupakan produk unggulan di Kecamatan Sebatik Barat. Rumput laut dibawa ke Pelabuhan Nunukan dan selanjutnya diangkut pengumpul ke Makasar atau Surabaya melalui kapal laut. Khusus untuk penjualan kelapa sawit tetap dilaksanakan ke Tawau Malaysia karena di kota Nunukan belum ada pabrik pengolahan kelapa sawit. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan Kecamatan Sebatik Barat dalam wawancara penulis bahwa:

“Hasil perkebunan masyarakat di Kecamatan Sebatik Barat sebagian dijual ke Nunukan seperti lada, dan sebagian lagi di jual ke Tawau Malaysia seperti kelapa sawit karena di nunukan tidak ada pabrik pengolahan kelapa sawit, untuk kebutuhan sehari-hari seperti gula, gas, minyak makan masih mengharapkan pasokan dari Tawau Malaysia namun untuk beras, indomie persediaan barang dari Nunukan sudah cukup.” (Wawancara 12 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa untuk memenuhi persediaan kebutuhan pokok masyarakat Kecamatan Sebatik

Barat sebagian barang Indonesia yang di bawa dari Nunukan namun sebagian lagi dari Tawau. Jika mengharapkan persediaan barang-barang dari Nunukan tidak akan cukup oleh karena itu masyarakat tetap mengharapkan barang - barang produk malaysia meskipun harus dilaksanakan secara ilegal dari Tawau Malaysia dan harganya yang relatif mahal .

Posisi tawar masyarakat di lokus penelitian dalam hal penjualan hasil bumi sangat lemah dimana harga ditentukan oleh pembeli dari Tawau Malaysia. Masyarakat tidak memiliki alternatif lain untuk menjual hasil usaha tani mereka, mengingat penjualan ke Nunukan atau Tarakan biaya ongkos angkutnya relatif mahal.

Perhatian pemerintah kepada perekonomian masyarakat di lokasi penelitian penulis sudah cukup baik, hasil observasi di lapangan bahwa pemerintah sering memberikan bantuan alat – alat yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat seperti mesin pengolahan kripik pisang. Masyarakat diberikan bantuan mesin pengolahan kripik pisang agar pisang tidak hanya dijual ke Malaysia dalam bentuk mentah tapi sudah dapat diolah sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi. Namun timbul masalah dalam pemberian bantuan ini seperti diungkapkan Sekertaris Camat Kecamatan Sebatik Tengah dalam wawancara penulis:

“Pemerintah pusat memberikan bantuan mesin pembuat kripik pisang di daerah kami, namun masyarakat tidak tau cara menggunakan alat ini. Alat ini memang sangat bagus untuk menaikkan nilai jual pisang yang merupakan hasil perkebunan terbesar di daerah ini yang selama ini di jual mentah ke

Tawau Malaysia. Oleh karena itu perlu ada pelatihan dalam pengoperasian alat ini serta pendampingan dalam pemasarannya “. (Wawancara 12 April 2016).

Senada dengan informasi dari Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah, Sekertaris Kecamatan Sebatik Utara juga menjelaskan bahwa bantuan mesin pembuat kripik pisang dari pemerintah pusat sejak diberikan sampai sekarang tidak pernah digunakan oleh masyarakat karena tidak mengerti cara mengoperasikannya. Dalam hal ini pemerintah seharusnya membuat program lanjutan untuk meningkatkan SDM dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara menggunakan mesin pembuat kripik pisang ini dan melaksanakan pendampingan dalam pengepakan kripik yang lebih higienis serta pendampingan dalam pemasaran sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bidang perikanan di lokus penelitian juga sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan membangun infrastruktur tempat pelelangan ikan di Kecamatan Sebatik Utara, namun hasil obsevasi penulis di lapangan bahwa gedung ini tidak pernah digunakan sejak dibangun sampai sekarang seperti informasi dari Sekertaris Camat Kecamatan Sebatik Utara dalam wawancara berikut ini :

“Pemerintah provinsi sudah membangun tempat pelelangan ikan di wilayah kami yang sebetulnya sangat dibutuhkan masyarakat sebagai tempat menjual hasil tangkapan ikan di laut agar nelayan tidak selalu menjual hasil tangkapan ikan ke Tawau Malaysia tapi pedagang Malaysia yang datang membeli ke tempat pelelangan ikan ini namum bangunan ini

belum pernah digunakan sampai sekarang karena tempat pelelangan ikan yang di bangun tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti pabrik es batu, jaringan air berih dan fasilitas pendukung lainnya .” (Wawancara 12 April 2016).

Hasil pengamatan penulis di lapangan bahwa bangunan tempat pelelangan ikan ini sudah rusak bahkan jembatan dermaga sudah ambruk, padahal jika bangunan ini bisa berfungsi dengan baik dapat meningkatkan pendapatan nelayan karena pedagang – pedagang dari tawau tidak bisa semaunya lagi membeli sesuai dengan harga yang mereka tetapkan. Kondisi sekarang para nelayan menjual ke Tawau berdasarkan penawaran pedagang Tawau karena jika tidak dijual hasil tangkapan nelayan akan rusak dan nelayan akan tambah rugi.

Salah satu aspek dalam pendekatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar yang digagas oleh ILO adalah ketersediaan lapangan kerja yang produktif yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang dan pangan. Pembangunan tempat pelelangan ikan, pemberian batuan mesin pembuat kripik pisang merupakan program yang bisa membuka lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat jika program ini berhasil sesuai dengan tujuannya namun program tersebut yang dilaksanakan di lokus penelitian bisa dikatakan tidak berhasil. Dari penjelasan diatas bahwa tempat pelelangan ikan dan mesin pembuat kripik pisang tidak pernah digunakan masyarakat, seharusnya ada program lanjutan dari

pemerintah agar kedua program ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

Infrastruktur pasar sudah dibangun di tiga kecamatan ini namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini diketahui dari hasil observasi di lapangan berikut penjelasan Sekretaris Kecamatan Sebatik Utara tentang pasar di Aji Kuning yang belum digunakan :

“ Pembangunan pasar di Aji Kuning yang dibangun pemerintah tidak berfungsi karena lokasinya terlalu jauh dari pemukiman, angkutan ke pasar ini juga susah. Pemerintah membangun di daerah ini karena tidak ada anggaran untuk membeli lahan di tempat yang strategis akhirnya dibangun diatas tanah hibah masyarakat yang jauh dari pemukiman. Akhirnya pasar ini hanya dimanfaatkan sebagai pasar tidak tetap yang digunakan sekali seminggu atau dua kali dalam seminggu.” (Wawancara 12 April 2016).

Pasar merupakan wahana pertemuan berbagai segmentasi di masyarakat sekaligus merupakan indikator perekonomian di suatu wilayah. Kemampuan perekonomian masyarakat dapat diketahui dari tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi di dalam pasar, semakin besar arus permintaan maka daya beli masyarakat semakin baik yang berarti tingkat kesejahteraan perkonomian semakin makmur. Pembangunan pasar di Aji Kuning yang dibangun oleh pemerintah tidak dapat difungsikan dengan baik karena jauh dari pemukiman merupakan indikasi dari kurang jelian pemerintah dalam mencermati perilaku pasar di daerah tersebut.

Hal yang sama disampaikan oleh Kabid Infrastruktur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan bahwa kendala utama kita dalam pelaksanaan pembangunan di daerah Pulau Sebatik adalah masalah lahan. Sejak ada wacana Pulau Sebatik akan dijadikan daerah otonomi baru maka sangat susah untuk mendapatkan tanah hibah dari masyarakat di tempat yang strategis. Sementara anggaran dari pusat untuk pembangunan fisik harus segera kita realisasikan jika tidak maka anggaran pembangunan akan kembali ke pusat. Hal inilah yang menyebabkan sehingga seringkali pembangunan tidak pada lokasi yang strategis. Alokasi anggaran dari pusat sudah cukup besar namun kesiapan kita dari pemerintah daerah dalam hal pembebasan lahan masih kurang karena keterbatasan anggaran. Dari penjelasan diatas bahwa koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih kurang dalam mensinkronkan program pembangunan yang akan dilaksanakan yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang hanya mengejar target realisasi dan mengesampingkan manfaat untuk masyarakat.

Program pembangunan dalam bidang sosial ekonomi yang dilaksanakan pemerintah di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sudah cukup banyak namun dapat dikatakan belum berhasil dengan baik seperti bantuan mesin pembuat kripik pisang yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan

menambah nilai jual pisang setelah diolah menjadi kripik namun mesin bantuan ini tidak dapat dipergunakan masyarakat karena tidak ada pelatihan dan bimbingan dari pemerintah. Begitu juga dengan pembangunan tempat pelelangan ikan yang tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan para nelayan dengan mengurangi biaya transportasi menjual ke tawau dan juga untuk menguatkan posisi nelayan kita dalam menentukan harga penjualan ke pedagang dari tawau namun hal ini belum terealisasi.

c. Pembangunan dalam Bidang Pendidikan

Tantangan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia sekarang ini amat besar begitu pula yang terjadi di Kabupaten Nunukan khususnya daerah perbatasan di Pulau Sebatik mutu pendidikan masih kurang baik dalam pengetahuan maupun dalam pendidikan nilai kemanusiaan belum dapat dirasakan semua warga masyarakat dan ketenagakerjaan masih terkendala adanya keterbatasan pasar kerja, kesenjangan pembangunan daerah perbatasan masih dirasakan.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan dunia ini terasa menjadi kecil sehingga apapun yang terjadi di belahan bumi dengan cepat diketahui seluruh dunia. Implikasi dari perkembangan iptek yang semakin pesat mampu mempengaruhi kehidupan manusia secara individu maupun berkelompok, ini dikarenakan informasi tentang nilai dari negara lain dengan mudah

diakses di Indonesia. Akibatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dapat mempengaruhi perkembangan manusia secara individu karena nilai-nilai negara lain baik yang jelek maupun yang baik dengan mudah masuk ke Indonesia.

Kaitannya dengan dinamika pasar bebas tampak jelas hanya produk dan tenaga yang bermutu dapat menang bersaing, pengaruh globalisasi sudah harus dihadapi karena tidak dapat dicegah lagi dan merupakan tantangan bagi daerah khususnya Kabupaten Nunukan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin kompleks. Pembangunan SDM diarahkan untuk membantu dan memberdayakan manusia membangun daya kekuatan yang kreatif dan mampu melakukan sesuatu, salah satu aspek individual dari pemberdayaan adalah agar manusia memiliki kemampuan berpikir menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengambil keputusan, memecahkan masalah dan membangun berbagai keterampilan. Selain itu juga membantu manusia untuk membangun kekuatan bersama, solidaritas atas dasar komitmen pada tujuan dan pengertian yang sama, untuk memecahkan persoalan yang dihadapi guna menciptakan kesejahteraan bersama.

Pemerintah Daerah telah menyadari pentingnya pembangunan SDM di Kabupaten Nunukan dengan harapan masyarakat dapat meningkat kesejahteraannya. Pembangunan SDM mempunyai dampak yang sangat luas bagi masyarakat untuk menjamin kehidupan dan

kesejahteraannya, sehubungan dengan hal tersebut untuk mewujudkannya diperlukan upaya – upaya dan terobosan yang mengarah kepada peningkatan mutu, pemerataan dan perluasan pendidikan hingga ke daerah perbatasan.

Untuk mengetahui keadaan dari pendidikan masyarakat di lokus penelitian, penulis melakukan wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Sebatik Tengah :

“Kondisi pendidikan dasar di Kecamatan Sebatik Tengah masih jauh dan tertinggal jika dibandingkan dengan pendidikan di kota, dengan minimnya fasilitas pendukung seperti buku, alat peraga perpustakaan, gedung sekolah yang belum memadai dan terbatasnya jumlah guru yang mengajar.” (Wawancara 12 April 2016).

Dalam bidang pendidikan infrastruktur untuk pendidikan dasar di lokus penelitian belum maksimal ada dua desa yang belum memiliki sekolah dasar yaitu di Kecamatan Sebatik Utara di Desa Seberang dan di Kecamatan Sebatik Tengah di Desa Maspul. Sekolah Dasar di Desa Seberang masih menumpang di kolong rumah penduduk seperti yang disampaikan kepala desa dalam wawancara penulis sebagai berikut :

“ Sekolah Dasar di Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara belum memiliki bangunan sekolah, jadi untuk sementara siswa meminjam kolong rumah masyarakat untuk tempat belajar. Tapi ini sudah kami usulkan rencananya akan segera dibangun pemerintah”. (Wawancara 12 April 2016).

Kondisi ruang kelas belajar di kolong rumah penduduk sudah pasti menjadikan para siswa dan guru tidak nyaman dalam proses

belajar mengajar oleh karena itu sangat dibutuhkan gedung sekolah dasar dengan ruang kelas belajar yang memadai. Pembangunan sekolah dasar ini sudah diusulkan setiap tahun oleh masyarakat melalui musrenbang namun belum direalisasikan pemerintah.

Sebagaimana kondisi di Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara keadaan di Desa Maspul Kecamatan Sebatik Tengah tidak jauh berbeda yaitu belum memiliki sekolah dasar, jadi anak-anak harus ke desa terdekat untuk menempuh pendidikan dasar dengan jarak yang cukup jauh beruntung pemerintah daerah sudah menyediakan bus angkutan pelajar sebagai sarana transportasi anak sekolah setiap hari. Kondisi serupa terjadi di SMPN 1 Sebatik Tengah, sekolah ini kekurangan ruang kelas belajar seperti yang disampaikan kasi kesejahteraan masyarakat kecamatan sebatik tengah dalam wawancara penulis sebagai berikut:

“.....SMPN 1 Kecamatan Sebatik Tengah kekurangan ruang kelas belajar jadi terpaksa memakai ruang perpustakaan , laboratorium IPA dan ruang asrama putra/putri sebagai ruang kelas belajar karena hanya memiliki lima ruang kelas sementara siswanya ada sembilan kelas .” (Wawancara 12 April 2016).

Demikian juga keadaannya untuk SMAN 1 Sebatik tengah yang diresmikan sejak tahun 2010 namun masih meminjam gedung SDN 006 dan SMPN 1 Sebatik Tengah Desa Aji kuning sebagai tempat belajar karena belum memiliki gedung sekolah, jadi sekolahnya disore hari. Informasi dari Sekertaris Camat Sebatik Tengah bahwa gedung sekolah sudah dibangun tetapi belum lengkap fasilitasnya karena keterbatasan

anggaran maka pembangunannya secara bertahap dan juga sumber dana pembangunannya berbeda ada dari pusat, propinsi dan daerah. Berikut informasi dari Sekertais Camat Kecamatan Sebatik Tengah :

“Bangunan sekolah sudah jadi tapi ruang kelasnya belum cukup, baru empat ruang kelas karena keterbatasan anggaran dengan sumber dana pembangunannya dari APBN dan APBD. Namun rencananya tahun ini akan digunakan, karena kalau kita menunggu sampai bangunan fasilitasnya selesai semua bisa-bisa bangunan yang lama akan rusak. Akses jalan menuju sekolah sudah dibuka rencananya tahun ini akan selesai.” (Wawancara 12 April 2016)

Pembangunan sekolah SMAN 1 Sebatik Tengah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam satu tahun anggaran untuk satu ruang kelas belajar saja atau gedung laboratorium dan untuk tahun ini yang sedang dilaksanakan adalah akses jalan menuju sekolah. Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan sekolah lengkap dengan fasilitasnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, namun kondisi sekarang pemerintah pusat, propinsi dan daerah membangun membangun bergantian setiap tahun sehingga bangunan sekolah dan fasilitasnya tidak selesai – selesai seperti pembangunan SMAN 1 Sebatik Tengah yang diresmikan sejak tahun 2010 tapi sampai sekarang gedung sekolahnya belum rampung dan masih meminjam gedung sekolah SDN 006 dan SMPN 1 Sebatik Tengah.

Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sebatik Barat ada dua sementara luas wilayah Kecamatan Sebatik Barat sekitar 93,27Km²

dengan medan yang cukup berat. Oleh karena itu siswa SMP dari Desa Bambang harus menempuh perjalanan sekitar 24 km setiap hari untuk mencapai SMP meskipun angkutan pelajar sudah disiapkan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis kepada Kepala Desa Bambang:

“Kami selalu mengusulkan kepada pemerintah agar penambahan SMP karena jarak yang ditempuh anak-anak kami untuk sekolah ke SMP cukup jauh meskipun pemerintah daerah sudah menyiapkan bus angkutan pelajar namun seringkali anak-anak kami berjalan kaki jika ketinggalan angkutan dan busnya sudah terlalu penuh. “ (Wawancara 12 April).

Kondisi sekolah yang di uraikan diatas menggambarkan bahwa sarana pendidikan utamanya gedung sekolah baik tingkat SD, SMP maupun SMU belum memadai dengan masih kurangnya ruang kelas belajar, penggunaan satu gedung sekolah untuk dua sekolah atau lebih, dalam hal ini pendekatan pembangunan untuk mencukupi kebutuhan dasar yang digagas oleh ILO bahwa penyediaan secara langsung kebutuhan dasar berupa fasilitas pendidikan belum terealisasi dan belum dinikmati masyarakat di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara. Pembangunan yang dilaksanakan di lokus penelitian belum memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, fasilitas pendidikan masih kurang.

Sekolah Menengah Umum tidak ada di Kecamatan Sebatik Barat yang ada Sekolah Menengah Kejuruan di bidang perikanan oleh karena

itu jika ada siswa Kecamatan Sebatik Barat yang ingin melanjutkan ke SMU maka harus ke kecamatan lain atau ke Kabupaten Nunukan. SMK perikanan dibangun pemerintah di Kecamatan Sebatik Barat karena potensi kecamatan yang ini yang banyak di bidang perikanan dengan fasilitas sekolah yang cukup memadai.

Akses jalan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Sebatik Tengah belum memadai masih ada beberapa sekolah yang aksesnya masih jalan tanah dan perlu peningkatan jalan seperti tabel berikut :

Tabel. 4.7
Kondisi akses jalan ke sekolah di Kecamatan Sebatik Tengah

No	Sekolah	Kondisi Jalan
1	SD 01 Sebatik Tengah	Semenisasi
2	SD 02	Jalan Aspal
3	SD 03	Jalan Tanah
4	SD 04	Jalan Tanah
5	SD 05	Jalan Tanah
6	SD 06	Jalan Agregat
7	SMP 1 Satu atap SMA 1	Jalan Tanah
8	SMP 2	Jalan Tanah
9	Sekolah Tapal Batas	Jalan Agregat dan ruang belajar masih ngontrak

Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2016

Pada Tabel 4.7 di atas nampak bahwa kondisi jalan yang belum memadai menuju ke sekolah-sekolah di Kecamatan Sebatik tengah sebagian besar masih jalan tanah. Dengan kondisi seperti ini maka agak sulit bagi anak sekolah di Kecamatan Sebatik Tengah untuk menempuh pendidikan, apalagi jika musim hujan otomatis jalan menuju sekolah becek dan berlumpur. Dengan keadaan ini maka paling tidak bisa

menghambat situasi belajar mengajar. Untuk itu maka masyarakat sangat mengharapkan perbaikan akses jalan ke sekolah-sekolah. Pada tabel 4.7 diatas juga nampak bahwa sekolah tapat batas selain akses menuju sekolah yang belum memadai ruang kelas belajar juga masih ngontrak, sekolah ini dikelola oleh pihak swasta .

Untuk tenaga pendidik di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara dapat dilihat dalam tabel rasio peserta didik terhadap guru pada tabel berikut ini :



Tabel. 4.8
Rasio peserta didik terhadap guru menurut jenjang pendidikan di
Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan
Kecamatan Sebatik Utara Tahun Ajaran
2012/2013 - 2014/2015

No	Kecamatan	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	Kecamatan Sebatik Barat			
	- TK Swasta	6	5	5
	- SD Negeri	15	15	16
	- SD Swasta	5	6	17
	- SMP Negeri	13	12	12
	- SMP Swasta	-	-	-
	- SMK Kejuruan Negeri	12	12	10
2	Kecamatan Sebatik Tengah			
	- TK Swasta	-	14	14
	- SD Negeri	14	15	15
	- SD Swasta	-	-	-
	- SMP Negeri	18	18	19
	- SMP Swasta	-	-	-
	- SMA Negeri	20	16	17
3	Kecamatan Sebatik Utara			
	- TK Swasta	9,78	8,78	10,78
	- SD Negeri	17	16	17
	- SD Swasta	27,86	17	19
	- SMP Negeri	23	22	28,29
	- SMP Swasta	-	8	7
	- SMA Negeri	-	-	-
	- SMA Swasta	4,88	12	17

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan 2016

Pada Tabel 4.8 diatas nampak bahwa rasio antara peserta didik dan guru dari tahun ajaran 2012/2013 sampai 2014/2015 relatif stabil tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tabel diatas juga nampak bahwa rasio antara peserta didik dengan guru TK di Kecamatan Sebatik Tengah paling tinggi yaitu 14 anak setiap 1 orang guru ,

sedangkan untuk tingkat SD rasio peserta didik dengan guru yang paling tinggi adalah di Kecamatan Sebatik Utara yaitu 17 murid setiap 1 orang guru. Sementara untuk tingkat SMP rasio peserat didik dengan guru yang paling tinggi adalah di Kecamatan Sebatik utara yaitu 28 siswa setiap 1 orang guru dan untuk tingkat SMU/SMK rasio peserta didik dengan guru yang paling tinggi ada di Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara yaitu 17 siswa untuk 1 orang guru. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 17 menetapkan bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru untuk tingkat TK adalah 15 : 1, untuk tingkat adalah SD, SMP dan SMA adalah 20 : 1, sedangkan untuk tingkat SMK 15 : 1 . Rasio antara peserta didik dan guru pada tabel 4.7 diatas masih sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, kecuali untuk tingkat SMP rasionya melebihi standar oleh karena itu perlu penambahan tenaga guru.

Dari hasil observasi penulis di lapangan pembangunan memenuhi kebutuhan dasar berupa fasilitas pendidikan memiliki banyak permasalahan seperti yang disampaikan diatas, data tentang sarana dan fasilitas pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara menunjukkan bahwa pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa fasilitas pendidikan belum terpenuhi meskipun sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah namun masih perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa menikmati pendidikan dengan baik. Seperti gedung

sekolah yang masih kurang, akses menuju sekolah yang belum memadai serta jumlah guru yang masih kurang untuk tingkat pendidikan tertentu.

Dalam mencerdaskan kehidupan manusia saat ini faktor telekomunikasi dan informasi, perpustakaan yang memadai merupakan bagian yang berperan dalam membantu meningkatkan kualitas SDM, sekolah – sekolah di lokus penelitian memiliki masalah yang sama yaitu kurang dan terbatasnya buku bacaan siswa, terbatasnya jaringan internet/informasi sehingga tidaklah mengherankan jika dari akses perkembangan ilmu dan informasi siswanya ketinggalan dibandingkan dengan pendidikan di kota.

Meskipun mengalami hambatan dan kendala dalam menempuh pendidikan, namun seiring perkembangan jaman modernisasi dan arus globalisasi yang terus maju berkembang saat ini yang menuntut agar dibarengi dengan sumber daya manusia yang handal, kritis dan berkualitas masalah tersebut tidaklah menjadi hambatan yang berarti bagi anak – anak perbatasan di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Faktor-Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik

Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara yang meliputi : Pembangunan dalam bidang infrastruktur, Pembangunan dalam bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan dalam bidang pendidikan yang merujuk pada pendekatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar.

Permasalahan pembangunan dalam bidang infrastruktur, bidang sosial ekonomi dan bidang pendidikan sebagaimana yang diuraikan diatas senada dengan penelitian terdahulu oleh Purwanto dan Syawie yang melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah Perbatasan Antar Negara” bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan masih dihadapkan pada sulitnya koordinasi dan sinergi keterpaduan program lintas sektoral serta keterlibatan masyarakat masih sangat rendah dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga sama dengan pembangunan di daerah perbatasan Pulau Sebatik bahwa masyarakat kurang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan serta kurangnya kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Begitu juga dengan penelitian terdahulu oleh Aziz Budianta bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan perlu keterpaduan dan sinkronisasi lintas sektor untuk dapat menghasilkan kemajuan pembangunan yang signifikan demi kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dari beberapa penelitian terdahulu tentang pembangunan di daerah perbatasan bahwa masyarakat belum ikut terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, hal ini tidak sesuai dengan pendekatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar yang

digagas oleh ILO bahwa untuk membangun menyediakan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka sendiri .

Hasil analisis dari penelitian ini adalah berusaha mengetahui faktor - faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik khususnya di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara yaitu :

a. Hambatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar di bidang infrastruktur :

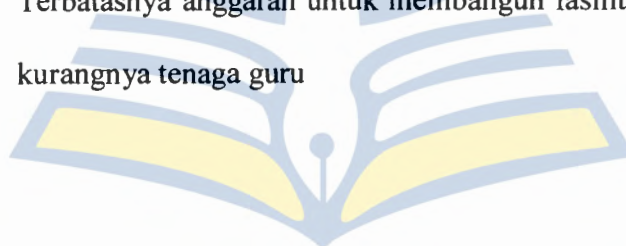
- 1) Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan di daerah perbatasan seperti jalan poros Mantikas – Sei.Nyamuk yang rusak tidak diperbaiki karena anggaran pemeliharaan tidak ada.
- 2) Masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seperti menentukan lokasi pembangunan akibatnya pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat seperti pelaksanaan reses DPR semenisasi di kebun kepala sawit masyarakat yang bukan merupakan usulan masyarakat secara umum tapi hanya ide usulan beberapa saja yang berkepentingan sementara usulan masyarakat yaitu jalan penghubung antar desa yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat tidak direalisasikan.

- 3) Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan
- b. Hambatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar di bidang sosial ekonomi
- 1) Masyarakat di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sangat tergantung kepada pasokan barang dari negara tetangga Malaysia karena persediaan barang produk dalam negeri terbatas dan perdagangan antar negara ini dilakukan secara ilegal.
 - 2) Program Pemberian bantuan alat kepada masyarakat untuk mengolah hasil pertanian agar dapat meningkatkan nilai jual hasil pertanian tersebut yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa pelatihan mengoperasikan alat tersebut dan pendampingan pemerintah dalam pemasaran hasil olahan
 - 3) Kurangnya pengawasan dari instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan sehingga realisasi pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan seperti pembangunan puskesmas di Kecamatan Sebatik Utara yang WC nya tidak sesuai standar kesehatan.
 - 4) Tidak berfungsinya fasilitas – fasilitas penunjang perekonomian rakyat yang dibangun oleh pemerintah seperti pasar dan tempat pelelangan ikan karena lokasinya yang kurang strategis,

pengelolaan pasar yang belum dilaksanakan pemerintah dan belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang.

c. Hambatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar di bidang pendidikan

- 1) Kurangnya fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah yang harus digunakan dua sekolah untuk satu gedung seperti SMPN 1 Sebatik Tengah yang juga digunakan oleh SMAN 1 Sebatik Tengah. Begitu juga dengan fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium, perpustakaan dan buku – buku yang terbatas.
- 2) Akses menuju sekolah – sekolah yang belum memadai dan jarak yang cukup jauh dengan medan yang harus ditempuh anak sekolah melewati pegunungan, bukit, jalan berbatu dan berdebu yang jika musim hujan datang jalanan menjadi becek dan berlumpur.
- 3) Terbatasnya anggaran untuk membangun fasilitas pendidikan dan kurangnya tenaga guru



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan dengan pendekatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar yang digagas oleh ILO, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Program pembangunan untuk mencukupi kebutuhan dasar yang dilaksanakan di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara dalam Bidang Infrastruktur, Bidang Sosial Ekonomi dan Bidang Pendidikan sudah cukup banyak namun ada beberapa program yang tidak tepat sasaran dan belum dapat dinikmati masyarakat secara maksimal karena : Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam melaksanakan pembangunan; Masyarakat belum dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan seperti dalam menentukan lokasi dan pembangunan yang akan dilaksanakan ; Program pemberian bantuan alat kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun untuk memenuhi fasilitas kebutuhan dasar masyarakat tanpa pelatihan dan pendampingan dari pemerintah; Kegiatan perekonomian masyarakat perbatasan di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara masih tergantung

pada negara tetangga Malaysia; Pembangunan fasilitas umum tidak dilengkapi dengan bangunan penunjang lainnya sehingga fasilitas tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2. Faktor – faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sabatik Utara adalah : Pembangunan bidang infrastruktur ; Kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah ; Masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ; Keterbatasan Anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan , Pembangunan bidang sosial ekonomi ; Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari sangat tergantung pada negara Malaysia untuk memasok kebutuhan pokok ; Tidak ada pelatihan kepada masyarakat dalam menggunakan alat bantuan dari pemerintah yang dapat membuka lapangan kerj produktif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka ; Kurangnya pengawasan dari instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan ; Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan , Pembangunan bidang pendidikan ; Kurangnya sarana dan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan dan buku – buku pelajaran; Akses menuju sekolah – sekolah yang belum memadai dan jarak ke sekolah yang cukup jauh ; Terbatasnya anggaran untuk membangun fasilitas pendidikan dan kurangnya tenaga guru.

B. Saran

Hasil penelitian ini terhadap pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yang dianalisis dengan pendekatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar disarankan beberapa hal sebagai berikut :

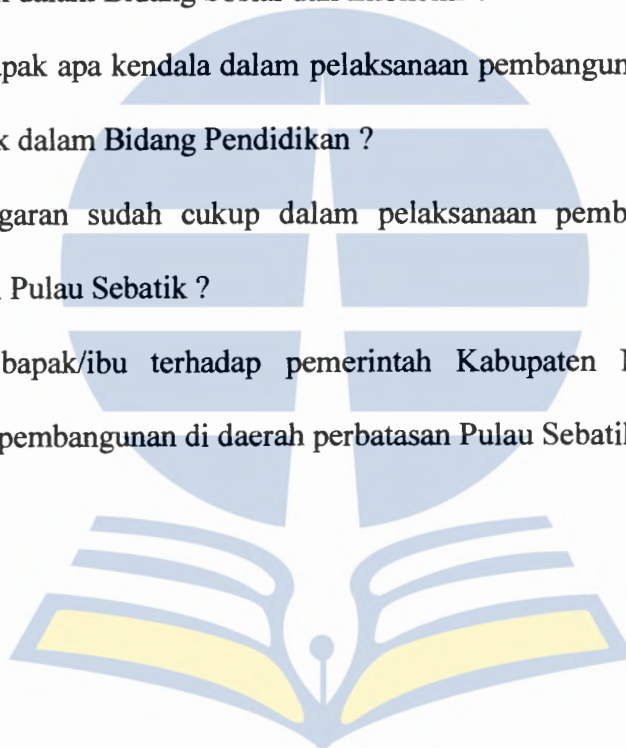
1. Pemerintah daerah membuat *grand* strategi pembangunan daerah perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yang berbasis masyarakat.
2. Pembangunan di Kecamatan Sebatik Utara agar lebih memprioritaskan usulan masyarakat utamanya pembangunan jalan
3. Penambahan mobil operasional puskesmas di Kecamatan Sebatik Tengah agar para media bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat karena kondisi
4. Angkutan pelajar di Kecamatan Sebatik Barat ditambah karena mobil yang ada tidak mencukupi untuk mengangkut anak sekolah.
5. Program pemberian bantuan alat kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasar dilanjutkan dengan program pelatihan pemanfaatan alat tersebut.
6. Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi ke pemerintah pusat dalam mensinkronkan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah perbatasan Pulau Sebatik

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Berikut ini disampaikan pedoman wawancara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data – data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini. Adapun daftar pertanyaan yang disampaikan kepada informan adalah sebagai berikut :

1. Program pembangunan yang dilaksanakan di Pulau Sebatik apakah berdasarkan usulan dari masyarakat ?
2. Sebelum pelaksanaan program pembangunan apakah ada penyampaian kepada Camat/Kepala Desa ?
3. Apakah pembangunan daerah perbatasan di pulau sebatik sudah sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat ?
4. Bagaimana pembangunan daerah perbatasan di wilayah bapak dalam bidang sosial ekonomi ?
5. Bagaimana pembangunan daerah perbatasan di wilayah bapak dalam bidang infrastruktur ?
6. Bagaimana pembangunan daerah perbatasan di wilayah bapak dalam bidang pendidikan ?
7. Dalam pemberian bantuan kepada masyarakat apakah dapat tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan dengan baik ?
8. Apakah pembangunan di Pulau Sebatik sudah melibatkan masyarakat ?
9. Program apa saja yang sudah dilaksanakan untuk pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik dalam Bidang Infrastruktur ?
10. Program apa saja yang sudah dilaksanakan untuk pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik dalam Bidang Sosial Ekonomi

11. Program apa saja yang sudah dilaksanakan untuk pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik dalam Bidang Pendidikan ?
12. Menurut bapak apakah pembangunan yang dilaksanakan di Pulau Sebatik sudah sesuai dengan perencanaan ?
13. Menurut bapak apa kendala dalam pelaksanaan pembangunan perbatasan di Pulau Sebatik dalam Bidang Infrastruktur ?
14. Menurut bapak apa kendala dalam pelaksanaan pembangunan perbatasan di Pulau Sebatik dalam Bidang Sosial dan Ekonomi ?
15. Menurut bapak apa kendala dalam pelaksanaan pembangunan perbatasan di Pulau Sebatik dalam Bidang Pendidikan ?
16. Apakah anggaran sudah cukup dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Pulau Sebatik ?
17. Apa saran bapak/ibu terhadap pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan Pulau Sebatik?



Lampiran 2. Matriks Hasil Wawancara dari Informan

No	Indikator	Hasil Wawancara	Ringkasan
1	Ketersediaan fasilitas memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang infrastruktur	<p>a. Kepala Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kami mengharapkan akses jalan ke perkebunan kelapa sawit masyarakat - Belum ada jalan penghubung antar desa di Kecamatan Sebatik Utara - Pembangunan yang dilaksanakan lewat reses DPR tidak diusulkan masyarakat - Pembangunan pustu tidak pernah digunakan karena lokasi jauh dari pemukiman - Ada 2 RT yang belum ada jaringan listrik sama sekali di Desa Bambang - Kantor desa Sebatik Tengah menggunakan genset untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat - Untuk air bersih kami bergantung kepada air hujan <p>b. Sekcam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan proyek PL sebagai realisasi reses tidak bermanfaat terkesan dipaksakan untuk keuntungan tim sukses 	<p>Jalan ke kebun belum ada</p> <p>Jalan penghubung antar desa belum ada</p> <p>Usulan masyarakat belum direalisasikan</p> <p>Lokasi pembangunan tidak disepakati dengan masyarakat</p> <p>Sebagian masyarakat belum menikmati jaringan listrik</p> <p>Sulit mendapatkan air bersih</p> <p>Usulan masyarakat belum direalisasikan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan puskesmas yang tidak sesuai standar kesehatan karena pengawasan yang kurang - Susah menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan karena jauh dan medan yang berat - Bantuan pemerintah pusat untuk menyaring air laut menjadi air bersih tidak bisa digunakan masyarakat 	<p>Penambahan mobil operasioanl puskesmas</p> <p>Tidak ada pelatihan/ pendampingan masyarakat dalam penggunaan bantuan alat</p>
2	Ketersediaan fasilitas memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang Sosial Ekonomi	<p>a. Kepala Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kami menjual hasil perkebunan dan perikanan ke Tawau - Tempat pelelangan ikan yang di bangun pemerintah tidak kami gunakan karena pabrik es batunya tidak ada - Untuk memenuhi kebutuhan pokok kami mengharapkan produk dari Malaysia <p>b. Staf Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasar yang dibangun belum digunakan oleh masyarakat - Persediaan produk dalam negeri untuk kebutuhan pokok mengharapkan produk dari Malaysia dan 	<p>Hasil Bumi di jual ke Tawau</p> <p>Kebutuhan pokok Masyarakat dari Tawau</p> <p>Perdagangan dengan Tawau Malaysia secara ilegal</p>

		<p>perdagangan dilakukan secara ilegal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan mesin pembuat kripik kepada masyarakat untuk meningkatkan harga jual tidak dipergunakan masyarakat 	<p>Tidak ada pendampingan/pelatihan kepada masyarakat dalam penggunaan mesin bantuan</p>
3	<p>Ketersediaan fasilitas memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan</p>	<p>a. Kepala Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak sekolah harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai sekolah dengan kondisi jalan tanah dan berbatu - Gedung SD belum ada di desa kami sehingga anak-anak belajar di kolong rumah penduduk <p>b. Sekcam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Laboratorium dan perpustakaan digunakan sebagai ruang kelas belajar - SMA 1 Sebatik tengah menggunakan SMP 1 untuk tempat belajar mengajar - 1 SMP untuk beberapa desa - Tidak semua sekolah mempunyai Perpustakaan dan laboratorium - Beberapa sekolah masih kekurangan guru 	<p>Jalan menuju sekolah belum bagus</p> <p>Gedung sekolah belum ada di beberapa desa</p> <p>Ruang kelas belajar masih kurang</p> <p>Fasilitas sekolah belum lengkap</p>

4	Faktor penghambat pembangunan fasilitas memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang infrastruktur, bidang sosial ekonomi dan bidang pendidikan	<p>a. Kepala Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kami kurang dilibatkan dalam pembangunan dan usulan-usulan masyarakat kurang direspon pemerintah - Bantuan alat kepada kami tidak disertai pelatihan jadi tidak bisa kami gunakan <p>b. Sekcam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana pembangunan tidak pernah melaporkan ke pihak kecamatan kalau sudah ada masalah baru ke kecamatan - Pelaksanaan reses DPR tidak sesuai dengan usulan masyarakat <p>c. Kabid infrastruktur BPPD Kab. Nunukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit membebaskan lahan yang strategis untuk pembangunan fasilitas masyarakat - Kegiatan dari pusat dan provinsi sering tidak sinkron dengan kegiatan yang diprogramkan pemda Kab nunukan 	<p>Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan</p> <p>Program lanjutan tidak ada dari pemerintah</p> <p>Koordinasi dengan pihak kecamatan kurang</p> <p>Usulan masyarakat belum direalisasikan pemerintah</p> <p>Anggaran terbatas untuk pembebasan lahan</p> <p>Koordinasi pemerintah untuk mensinkronkan program masih kurang</p>
---	--	--	--

Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sebatik Barat





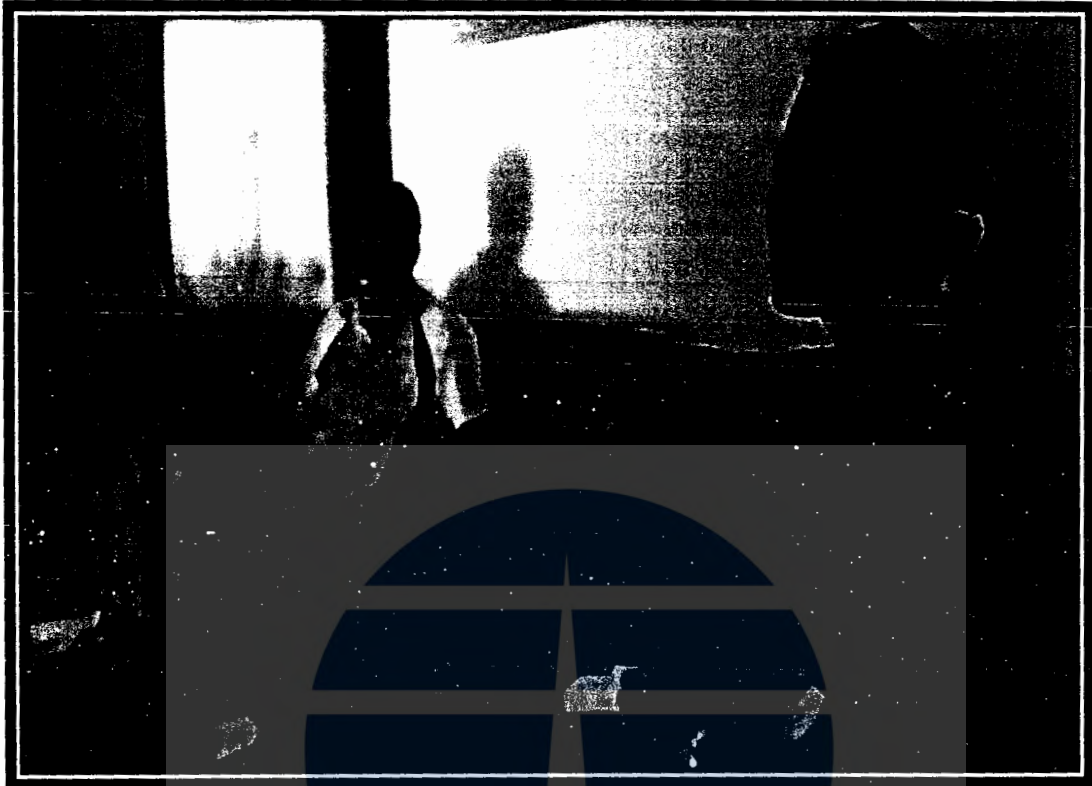


Wawancara dengan Sekertaris Camat Kecamatan Sebatik Tengah





Wawancara dengan Kepala Desa Sei. Nyamuk Kecamatan Sebatik Utara



Wawancara Dengan Kabid infrastruktur Badan Pengelola Perbatasan Daerah



Kondisi tempat pelelangan ikan di Sei. Nyamuk yang tidak pernah digunakan



Rumah dan mesin penyaring air laut menjadi air bersih yang tidak pernah digunakan di Kec. Sebatik Barat



Matriks Perbaikan Paca Ujian Sidang

Nama : Natalia Tangkeallo
 Nim : 500893435
 Judul : Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik
 Kabupaten Nunukan

No	Penguji / Pembimbing I	Masukan / Saran	Keterangan
1	Prof. Aries Djenuri, MA	<ul style="list-style-type: none"> - Data penelitian terdahulu pada latar belakang - Setiap dimensi pendekatan pembangunan mencukupi kebutuhan dasar dijelaskan pada tinjauan pustaka - Tambahkan faktor penghambat pada Kerangka berpikir - Aspek Ketersediaan sandang, pangan dan permukiman ditambahkan pada pembahasan 	<p>Sudah diakomodir pada halaman 8</p> <p>Sudah diakomodir Pada halaman 35</p> <p>Sudah diakomodir pada halaman 47</p> <p>Sudah diakomodir pada halaman 65</p>
2	Dr. Sofjan Aripin, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> - Saran spesifik untuk setiap kecamatan yang menjadi lokasi penelitian 	Sudah diakomodir pada halaman 104

